

ANALISIS RESOLUSI KONFLIK DI THAILAND SELATAN:

MELALUI PENDEKATAN TEORI *COLLECTIVE IDENTITY*



Oleh :

SOPHEEYAH SANI

15323129

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

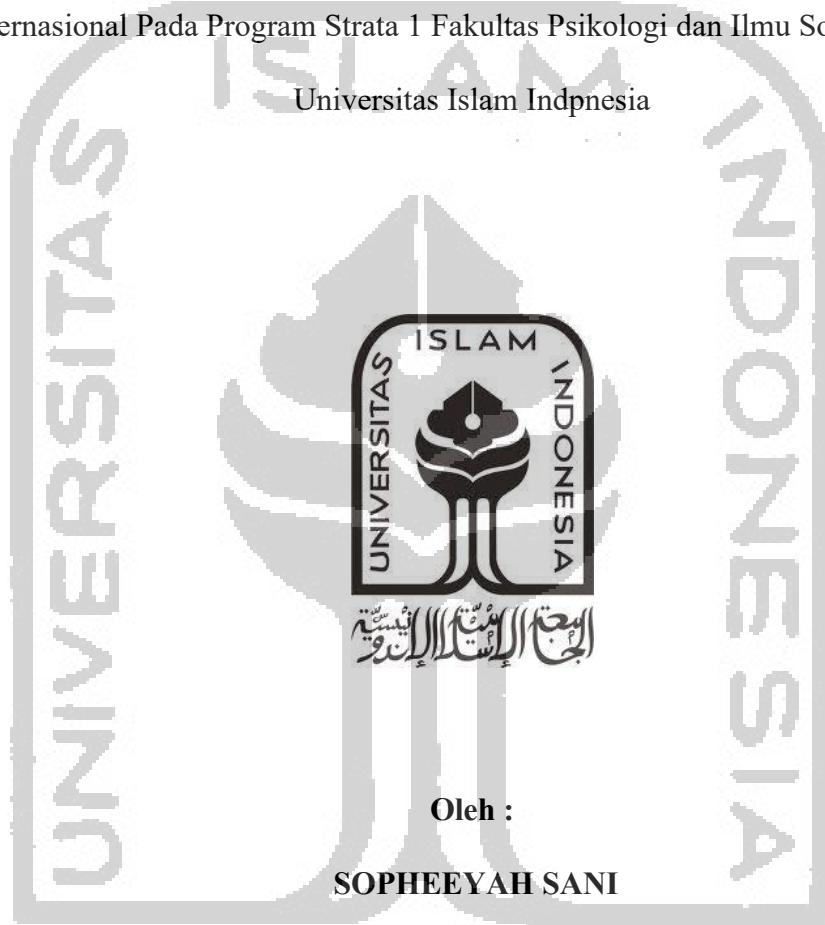
2019

ANALISIS RESOLUSI KONFLIK DI THAILAND SELATAN:

MELALUI PENDEKATAN TEORI *COLLECTIVE IDENTITY*

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan
Internasional Pada Program Strata 1 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Oleh :

SOPHEEYAH SANI

15323129



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

ANALISIS RESOLUSI KONFLIK DI THAILAND SELATAN:

MELALUI PENDEKATAN TEORI *COLLECTIVE IDENTITY*

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Sebagian Dari syarat-syarat Guna Mempeoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

9 December 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

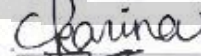
Ketua Program Studi


Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.

Dewan Penguji

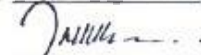
1. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
2. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.
4. Willi Ashadi S.H.I., M.A.

Tanda Tangan









PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Sopheeyah Sani

No. Mahasiswa : 15323129

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Resolusi Konflik di Thailand Selatan: Melalui pendekatan *Collective Identity*

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, November 2019

Yang menyatakan,



Sopheeyah Sani

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya,
Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ibu dan Bapak

Atas segala doa, dukungan, cinta dan kasih sayangnya. Terimakasih, Malaikatku.

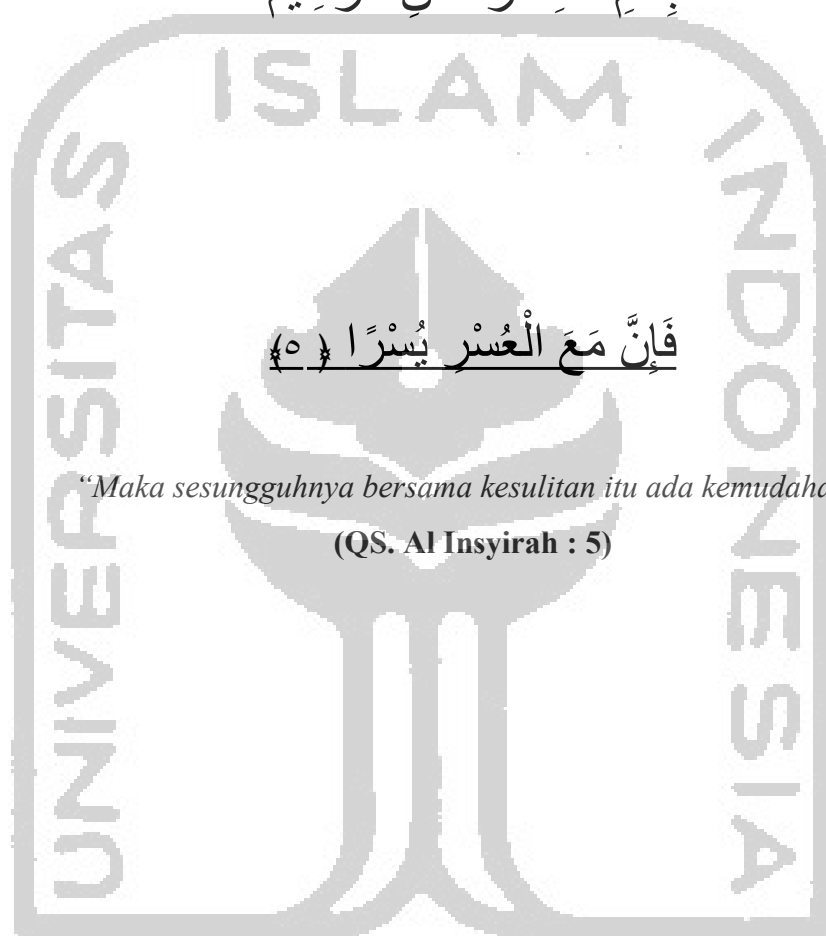
Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas do'a, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan".

(QS. Al Insyirah : 5)

لَا يَجِدُ إِلَّا إِلَهَ الْعَالَمِينَ

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ahamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala kenikmatan dan anugerah-Nyayang tiada terkira, sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada usnawatun khasanah kita Nabi Muhammad SAW yang bersamanya kemuliaan dan keagungan Islam.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku Mr. Ayu Sani dan Mrs. Mariyoh Chedeng yang selalu mendoakan. Do'a dari mama dan abah merupakan kekuatan bagiku. Terima kasih yang tak terhingga kepada mama dan abah yang selalu menyayangiku, membimbing, membesarkan, dan mendidik aku untuk menjadi orang yang baik. Terimakasih atas kerja keras mama dan abah sehingga saya mampu untuk mewujudkan mimpi untuk kuliah di luar negeri. Terimakasih atas motivasinya mama dan abah yang mendukung saya hingga lulus perkuliahan di HI UII. Semoga kerja keras dan jerih payah mama dan abah menjadi berkah dan semoga mama dan abah di berikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah SWT.

2. Kakak saya Mr. Jeffree Sani yang selalu mendukung saya selama perkuliahan di Indonesia. Terimakasih atas motivasi dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi saya saat kuliah di Indonesia. Semoga kakak saya dilancarkan pekerjaannya dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

3. Bapak Willi Ashadi S.H.I., M.A. selaku dosen bimbingan skripsi saya dengan banyak bantuan dan banyak memberikan inspirasi kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Kaprodi, Bapak Irawan Jati, S.IP. M.Hum.,M.S.S selaku dosen bantuan skripsi saya. Serta dosen-dosen HI UII khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.a, Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., serta seluruh dosen-dosen UII. Terimakasih atas semua ilmu yang telah di berikan kepada saya selama saya kuliah di UII kurang lebih empat tahun. Terima kasih atas didikan, motivasi dan semangat yang di berikan kepada saya, sehingga yang saya rasa HI UII merupakan rumah bagi saya untuk belajar dan menimba ilmu. Semoga bapak dan Ibu dosen yang tercinta senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

5. Terimakasih kepada teman Indonesia Ummu Masyithotol Khoiriyah, Helfina Yusuf yang selalu membantu skripsi saya. Terimakasih teman-teman HI angkatan 2015 dan kakak tingkat 2014 yang telah membantu saya selama perkuliahan di HI UII.

6. Terimakasih kepada teman-teman Thailand Sorlihah Pohleh, Tasneem Madjamang, Nurainee U-mar, Surainee Musor, Yusree Binyusoh, Alpee Lohyapa, Huzairah Keudeng, Miskat Malam, Laila Deuramae, Nisreen Doloh, Ruwaida Ming yang selalu memotivasi saya selama perkuliahan di Indonesia. Terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sangat mendukung saya selama tinggal di Indonesia. Semoga dilancarkan perkuliahannya dan berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Terimakasih kepada guru SMA, guru SMP dan guru SD saya yang mendidikan saya serta selalu mendukung mimpi-mimpi saya hingga tercapai. Semoga di berikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah SWT.
8. Terimakasih kepada UII yang telah memberikan beasiswa dan bantuan kepada saya selama perkuliahan di Indonesia. Semoga UII menjadi kampus yang semakin berkembang dan berada dilindungan Allah SWT.

Yogyakarta, 2019

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	2
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	3
HALAMAN MOTTO.....	4
PRAKATA.....	5
BAB I: PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar belakang.....	11
1.2 Rumusan masalah.....	15
1.3 Tujuan penelitian.....	15
1.4 Signifikansi.....	16
1.5 Cakupan penelitian.....	17
1.6 Tinjauan pustaka.....	18
1.7 Landasan konsep/teori.....	22
1.8 Metode penelitian.....	25
1.8.1 Subjek penelitian.....	26
1.8.2 Alat pengumpulan data.....	26

1.8.3 Metode analisis data.....27

BAB II.....28

LATAR BELAKANG KONFLIK DAN FAKTOK PENYEBAB KONFLIK DI THAILAND SELATAN.....28

2.1 Latar belakang konflik di Thailand Selatan.....28

2.1.1 Kebijakan nasionalis dan kebijakan asimilasi periode pasca perubahan sistem pemerintahan pada tahun 1932.....29

2.1.2 Berjalannya konflik di Thailand Selatan.....31

2.1.2.1 Konflik fase I (1960-1998).....32

2.1.2.2 Konflik fase II (2001-2004).....34

2.1.2.3 Konflik fase III (2001-2018).....36

2.2 Faktor penyebab konflik di Thailand Selatan.....38

2.3 Respon pemerintah pusat terhadap insiden-insiden tahun 2004.....46

2.3 Kebijakan pemerintah terhadap konflik di Thailand Selatan.....48

2.5 Respon pihak internasional terhadap konflik di Thailand Selatan.....50

BAB III.....54

**ANALISA SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK DI THAILAND SELATAN:
MELALUI PENDEKATAN *COLLECTIVE IDENTITY*.....54**

3. Analisa konflik dan solusi konflik melalui pendekatan *collective identity*....56

3.1 *Constitutive norms*.....56

3.2 *Social purposes*.....62

3.3 *Relational comparisons with other sosial categories*.....67

3.4 *Cognitive model*.....70

BAB IV.....74

PENUTUP.....74

4.1 Kesimpulan.....74

4.2 Rekomendasi.....77

DAFTAR PUSTAKA.....78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Melayu Patani adalah suatu kelompok masyarakat yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Kata Patani merupakan wilayah atau "*Changwad Pattani*" sebagaimana yang wujud dalam peta negara Thailand sekarang. Tetapi Patani merujuk kepada sebuah negeri yang sangat luas yaitu meliputi wilayah Narathiwat, Yala dan sebagian dari Songkhla (daerah-daerah Sebayor dan Tibor). Adapun masyarakatnya berdarah Melayu Patani dan tinggal di Thailand Selatan.

Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan Semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah yang diantaranya adalah wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu yang beragama Islam di bawah perintah agama Buddha.

Masyarakat Melayu di tiga provinsi Thailand Selatan (dikenali juga sebagai masyarakat Melayu Patani) merupakan salah satu kelompok minoritas di Thailand, namun sebaliknya mereka merupakan kelompok mayoritas di tiga provinsi Thailand

Selatan. Masyarakat Melayu Patani merupakan orang Melayu dari segi kebudayaan, adat istiadat dan juga rupa paras [CITATION Ahm94 \l 1033].

Sejak tahun 1785 M, kerajaan Patani terkenal dengan bumi jajahan Thailand, dan diresmikan pada tahun 1902 M, sebagai bagian dari negara Thailand. Selama 117 tahun (1785-1902) Thailand menggunakan berbagai politik atau cara untuk melemahkan kerajaan Patani. Menurut Organisasi *Human Rights Watch* (HRW), sepanjang kurun waktu tersebut banyak warga Muslim yang diculik, disiksa dan dibunuh tanpa alasan. Selama berpuluh-puluh decade rakyat Melayu Patani berada didalam tekanan/tindasan Thailand, dan tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan budaya, mengamalkan agama dan sebagainya.

Tekanan dan penindasan tersebut mendorong rakyat Melayu Patani berusaha keras untuk melepaskan diri dari jajahan Thailand yang selama ini merenggut kemerdekaan mereka. Tujuan utama rakyat Melayu Patani adalah untuk mempertahankan wilayah atau daerah mereka yang telah dikuasai oleh kerajaan Thailand selama berabad-abad lamanya, sekaligus untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai budaya yang selama ini mereka anut. Rakyat Melayu Patani menjadikan perjuangan mereka sebagai jihad karena jihad merupakan kewajiban bagi umat Islam apalagi terhadap kepentingan agama.

Sejak 1906, sesuai dengan perjanjian Inggris-Siam, Thailand secara resmi mengambil alih negara-negara di Melayu Utara: Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla, dan Satun, yang kemudian menjadi provinsi di Thailand. Sementara Negara di

Melayu Utara yang lain: Kedah, Kelantan, Perlis dan Terangganu oleh Inggris dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia [CITATION Ahm94 \l 1033].

Sejak penyatuan Negara di wilayah Melayu Utara ke dalam bagian Thailand, terjadi benturan budaya antara Muslim Melayu dan Thai Buddhis. Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasai oleh Perdana Menteri masa tersebut yaitu Jenderal P. Pibhulsongkram (1938-1944), Marshal Sarit Thanarat, (1958-1963) dan para Jendral lainnya, kebijakan nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan utama. Upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai secara kuat di seluruh Thailand, termasuk wilayah Selatan, membuat benturan budaya yang keras dan menimbulkan resistensi sangat kuat bagi rakyat Melayu Patani di Thailand Selatan.

Upaya modernisasi dan pembaharuan administratif untuk menyatukan negara yang telah dimulai di bawah kerajaan yang terdahulu kehilangan momentumnya. Negara kembali terancam disintegrasi sebagai akibat adanya konflik-konflik kekuasaan di pusat dan persaingan etnis di daerah-daerah. Dan pada waktu itu juga pemerintah mengupayakan asimilasi kebudayaan sehingga kebudayaan Melayu Patani menjadi berkurang. Maka etnis Melayu mempertahankan identitas mereka dengan berbagai cara sehingga ada perlawanan etnis Melayu dengan pemerintah Thailand dalam mempertahankan identitas mereka [CITATION Pra04 \l 1033]. Akhirnya muncul gerakan separatisme yang semakin berkembang, sehingga munculnya kekerasan yang sulit diatasi. Terdapat tiga peristiwa atau insiden yang mengesankan pada tahun 2004 sangat menarik perhatian masyarakat Thailand dan dunia internasional

Pertama, pada tanggal 4 Januari 2004 terjadi insiden yang di anggap sebagai insiden awal atau akar terjadinya kekerasan di Thailand Selatan (*Api Selatan*) yaitu insiden “*Plon Peun*” (ปล้นปืน) atau Pencurian Senjata. Insiden *Plon Peun* terjadinya di provinsi Narathiwat. Pada kejadian tersebut terdapat empat tentara yang menjadi korban. Departemen Investigasi Khusus (DSI) menyatakan bahwa penjahat telah mencuri senjata senapan 413 silinder yang merupakan senjata milik pemerintah. Sejak insiden tersebut hingga sekarang, para pejabat pemerintah hanya menemukan 94 silinder senapan. Senjata-senjata yang telah dicuri oleh kelompok separatisme tersebut digunakan untuk melakukan kekerasan di daerah provinsi Thailand Selatan. Hal ini menimbulkan perasaan dilema oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat Melayu Patani. [CITATION Tha16 \l 1033].

Kedua, pada tanggal 28 April pada tahun yang sama yaitu 2004 terjadinya insiden “*Krue Sek*” (กรือเซะ) yang merupakan masjid tertua di Pattani. Kekerasan di *Krue Sek* telah menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terhadap masyarakat Melayu Patani tanpa rasa kepedulian terhadap masyarakatnya sendiri. Maka menimbulkan perasaan diskriminasi oleh masyarakat terhadap pemerintah [CITATION Isr11 \l 1033].

Ketiga, kekerasan tetap berlanjut pada tanggal 25 Oktober 2004 merupakan tanggal bersejarah yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat Melayu Patani. Peristiwa ini disebut oleh media sebagai insiden “*Tak Bai*” (ตากใบ). Peristiwa ini terjadi di depan kantor polisi Distrik Tak Bai, provinsi Narathiwat yang bertepatan dengan bulan Ramadhan 1425 H. Saat itu sejumlah orang Muslim mendatangi untuk

demonstrasi kepada polisi untuk membebaskan enam orang sukarelawan pertahanan kampung yang ditahan tanpa bukti kesalahan oleh pemerintahan pusat.

Aksi protes warga di Tak Bai yang tanpa senjata itu, berubah menjadi medan perang yang tidak terkendali dalam sekejap mata. Polisi dan tentara pemerintah melepaskan tembakan gas air mata dan tembakan peluru ke arah masyarakat yang sedang beraksi damai. Kemudian menangkap warga dengan cara membaringkan mereka berlapis-lapis sekitar 4-5 lapis dalam satu truk untuk mengantarkan ke kantor polisi [CITATION Is16 \l 1033]. Peristiwa tersebut menewaskan 85 korban ketika mengantarkan ke kantor polisi, enam orang meninggal ketika demonstrasi, sejumlah warga terluka dan selamat.

Kondisi yang dirasakan masyarakat Melayu Patani hingga saat ini merasa terancam dan tidak aman dalam aktivitas kesehariannya di Thailand Selatan. Setiap terjadi konflik antara tentara dan masyarakat Melayu Patani sering menjatuhkan korban masyarakat sipil di Thailand Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik yang belum selesai antara masyarakat Melayu Patani dengan pemerintah Thailand.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana solusi penyelesaian konflik Thailand Selatan dapat dilihat dari konsep *Collective Identity* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah latar belakang konflik di Thailand selatan,

2. Untuk mengetahui penanganan pemerintah pusat Thailand dalam menyelesaikan konflik di tiga provinsi Selatan,
3. Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik,
4. Untuk membahas alternatif atau cara-cara yang paling tepat untuk dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini untuk menambah substansi keilmuan terkait bidang Politik khususnya tentang penyelesaian konflik.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi konflik politik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini akan membahas tentang dinamika konflik di Thailand Selatan, dan memberikan solusi alternatif kepada pemerintah dalam mengatasi konflik. Penelitian ini harus dilakukan karena konflik yang telah lama menghancurkan kemakmuran yang seharusnya telah berada di Thailand Selatan, peneliti memberikan alternatif *Collective Identity* kepada pemerintah dalam mengatasi konflik di Thailand Selatan, karena belum ada penelitian lainnya yang membahas tentang alternatif *Collective Identity* ini.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan sejarah awal kejadian konflik, termasuk insiden pokok kejadian konflik. batas waktu adalah pada tahun 2004, dikarenakan tahun tersebut konflik mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia internasional. Peneliti akan mengangkat beberapa cara yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap wilayah Thailand Selatan sejak tahun 2004 sampai 2019. Penelitian ini akan membahas konflik-konflik yang dapat terlihat, dan tidak terlalu memfokus kepada hal-hal yang kompleks. Penelitian ini juga akan membawa kasus yang relevan dengan konsep yang dipilih oleh peneliti yaitu konsep *Collective identity*. Namun, penelitian ini akan membatasi beberapa pendalaman data konflik dikarenakan beberapa data sulit untuk didapatkan dan beberapa data sangat sensitif untuk dikolektifkan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Konflik yang terjadi di Thailand Selatan terdapat beberapa masalah pokok yang berupa masalah identitas, agama dan kesamaan yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga masyarakat minoritas merasa didiskriminasi oleh pemerintah dan kaum mayoritas. Konflik di Thailand Selatan dapat dipandang juga dari pandangan konstruktivisme, dimana konstruktivisme membahas mengenai identitas dan kepentingan yang perlu ditentukan oleh pemerintah. Konsep *Collective Identity* merupakan konsep yang terkait dengan pengelola identitas-identitas yang

berbeda agar menjadi satu yang telah diterapkan oleh ASEAN dan beberapa negara sebagai berikut :

Menurut Wendt (1992), konstruktivisme ini dapat digunakan untuk lebih memahami kondisi politik yang terus berubah. Dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif; dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya, dan yang memahaminya. Dunia sosial dibuat atau dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Sebagai contoh tentang dilema keamanan, bukan hanya dibuat dari fakta bahwa dua negara berdaulat memiliki senjata nuklir, Ia juga tergantung pada bagaimana negara-negara tersebut memandang satu sama lain. Struktur sosial memiliki tiga elemen : pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktek. Pertama, struktur sosial dijelaskan, dalam beberapa hal, oleh pemahaman, harapan atau pengetahuan bersama.

Hal ini menciptakan aktor-aktor dalam suatu situasi dan sifat hubungan mereka, dalam mempertimbangkan kooperatif ataupun konfliktual. Struktur sosial yang terdiri dari pemahaman intersubjektif dimana negara-negara sangat curiga bahwa mereka membuat asumsi-asumsi keadaan yang buruk tentang maksud masing-masing pihak, dan sebagai akibatnya menegaskan kepentingan mereka dalam hal menolong diri sendiri. Komunitas keamanan merupakan suatu struktur sosial yang berbeda yang terdiri dari pengetahuan bersama, dimana negara percaya satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tanpa perang. Ketergantungan struktur sosial pada pemikiran-pemikiran ini adalah hal dimana konstruktivisme memiliki pandangan idealis struktur.[CITATION Wen92 \l 1033]

Adapun tulisan dari Rijal (2016) dalam jurnalnya yang memberikan pengertian tentang pandangan konstruktivisme dari pandangan Indonesia dalam bergabung dengan ASEAN *Political-Security Community* (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar ASEAN *Community*. APSC merupakan upaya kerja sama negara-negara ASEAN dalam mewujudkan keamanan bersama, perdamaian dan lingkungan yang stabil untuk memajukan ASEAN sebagai organisasi regional. Dalam pandangan Indonesia, ancaman terorisme dan implikasinya terhadap ASEAN merupakan salah satu alasan yang mendorong mengapa ASEAN perlu mengembangkan APSC, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dan keamanan antar negara anggota ASEAN. Sekalipun perlu ditegaskan, bahwa APSC bukan hanya memberikan perhatian terhadap terorisme sebagai ancaman bersama, melainkan kerangka APSC mencakup seluruh aspek politik-keamanan yang menjadi tantangan kerja sama regional ASEAN, termasuk masalah demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, konsep komunitas politik-keamanan yang dicanangkan Indonesia juga menyetengahkan pengembangan suatu lingkungan yang adil, demokratis dan serasi (harmonious) serta penegakan hak-hak dan kewajiban asasi manusia. [CITATION Naj16 \l 1033]

Konstruktivisme dapat dipahami juga bahwa aktor-aktor yang sudah terkonstruksi secara sosial dan bersama dengan hal tersebut, muncul pula bahwa kepercayaan bahwa dalam praktik dan institusi-institusi yang pada awalnya dianggap paling mustahil untuk berubah.

Menurut Rosyidin (2014) dalam penelitiannya *ASEAN (In) Security Community: Arms Race and Collective Identity Building in Southeast Asia* tentang pentingnya menggunakan konsep *Collective Identity* dalam menyatukan komunitas keamanan ASEAN (*ASEAN Security community*), karena *Collective Identity* sebagai dasar solidaritas komunitas, dan loyalitas yang menggerakkan pemikiran dan tujuan yang sama. Namun, tanpa adanya *Collective Identity* negara-negara tidak dapat berkerjasama [**CITATION Muh14 \l 1033**]. Tulisan Rosyidin berbeda dengan penelitian ini bahwa penelitian akan menggunakan konsep *collective identity* sebagai alat analisis konflik.

Dilanjutkan Emanuel (2005) dalam jurnal berjudul, *Communitarian International Relations: The Epistemic Foundations of International Relations*, ia menjelaskan tentang keberhasilan pembentukan komunitas keamanan oleh ASEAN dengan menggunakan *Collective Identity*, bahwa kesadaran yang dimiliki oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina tentang ancaman ideologi komunisme yang merupakan ideologi yang tidak disetujui oleh lima negara tersebut. Untuk menghindari ancaman komunis mereka yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama mendirikanlah organisasi ASEAN sebagai tanggapan terhadap ancaman komunisme yang diekspor oleh Uni Soviet. Persepsi umum adalah faktor yang memungkinkan negara-negara di kawasan sepakat untuk membentuk organisasi regional yang berfungsi seperti benteng untuk mencegah penyebaran pengaruh ideologi komunis. Demikian, negara

menyadari ancaman komunis di kawasan ini sehingga mereka berusaha mencegah penyebaran ancaman ini dengan mendirikan komunitas keamanan. Keberhasilan dalam pembentukan komunitas keamanan tersebut berkembang terus hingga sekarang. [CITATION Adl16 \l 1033].

Dilanjutkan oleh juga Acharya, dalam bukunya *The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia* dan *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*, ia menjelaskan tentang hasil *Collective Identity* dari ASEAN. ASEAN berhasil dalam membangun *collective identity* pada regionalnya. Meskipun, ASEAN memiliki 10 negara yang berbeda-beda suku bangsa, budaya, bahasa, hukum, politik, dan perekonomian [CITATION Ami00 \l 1033]. (ASEAN saat ini sedang membangun tiga regional masyarakat, yang mencakup urusan politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Terlepas dari beberapa perpecahan dan kendala internal yang dipaksakan oleh kehadiran kekuatan besar dan pengaruh, ASEAN tetap berada di antara kelompok-kelompok regional yang paling kohesif dan dinamis di Asia dan dunia saat ini Norma-norma di seluruh interaksi intraregional membentuk suatu perasaan "*we-ness*" [CITATION Ami03 \l 1033].

Dibahas juga oleh Panich (2011) dalam jurnal *European Union identity and struggle for empire*, ia menjelaskan tentang hasil *Collective Identity* dari pembentukan Uni Eropa bahwa Uni Eropa sebagai kondisi hasil kesepakatan antar 27 anggota negara yang memiliki tingkat konsistensi yang cukup tinggi dan saling interdependen. Moto dari Uni Eropa sendiri berfokus kepada kesatuan, kombinasi bersama di bawah perbedaan *United in diversity* dan meminimalisir perbedaan

dengan *Systematic De-diversity*. Uni Eropa menggunakan mata uang Euro yang sama, penggunaan mata uang yang sama dapat meningkatkan kekuatan simbolis mereka karena kesamaan penggunaan mata uang sebagai penghancuran perbedaan budaya dari masing-masing negara di kawasan Eropa menurut prinsip “tatap bersama di bawah identitas yang berbeda”. Uni Eropa juga mengadakan perjanjian *Schengen Visa*, yang memudahkan masyarakat dalam keluar ke negara lainnya seperti berjalan disekitar rumah. Menurut Kritikon dapat diperjelaskan bahwa atribut pokok yang membentuk *Collective Identity* di benua Eropa terdiri dari: kombinasi bersama, bersama-sama dibawah perbedaan [CITATION Kri11 \l 1033]. Tulisan-tulisan diatas berbeda dengan penelitian ini bahwa penelitian ini akan menggunakan konsep *collective identity* sebagai alat analisis konflik.

Adapun penelitian terkait penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Pertama dari penelitian Naslan Wadeng Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universtas Islam negeri raden Intan Lampung, yang berjudul “*Konflik sosial pada masyarakat melayu pattani di Thailand Selatan*”, penelitian ini membahas tentang konflik di Thailand Selatan dan menawarkan beberapa cara penyelesaian kepada pemerintah seperti menyerukan pemerintah Thailand untuk memberikan subsidi kepada masyarakat Patani untuk haji, memberikan otonomi kusus kepada masyarakat Patani. Penelitian Naslan Wadeng ini hanya memberikan tawaran hukum yang telah banyak dilakukan oleh penelitian lainnya dan dari beberapa kebijakan yang ditawarkan oleh Nuslan telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, penelitian ini akan

Kedua penelitian dari Ilham Nuereng “*Dinamika bernegara masyarakat asli Thailand Selatan dalam perspektif sosiologi politik Islam*” dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ilham memberikan alternatif penyelesaian yang tidak berbeda jauh dengan Naslan. Ilham menawarkan alternatif penyelesaian eksternal yaitu berkerjasama dengan Malaysia dan Indonesia sebagai mediator penyelesaian konflik. Dari dua penelitian tersebut belum menawarkan pendekatan *Collective Identity* dalam mengatasi konflik, yang merupakan penyelesaian dari akar pikiran masyarakat yang masih merasakan diskriminasi agar lebih merasa bersatu dengan masyarakat Thailand Utara. Maka penelitian ini akan menjadi bahan alternatif kepada pemerintah dalam mencari solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik masyarakat Patani.

1.7 Landasan Konseptual

Konsep *Collective identity*

Konsep *Collective Identity* merupakan konsep yang fleksibel dalam menyatukan perbedaan yang dimiliki oleh negara atau kelompok-kelompok. Pengertian dari kata *Collective* adalah bersama atau gabungan, sedangkan arti dari *Identity* adalah identitas atau ciri-ciri, keadaan khusus seseorang. Identitas dapat dipahami sebagai aspek dari peta kognitif seseorang yang menyangkut konfigurasi dan struktur diri seseorang dalam hubungannya dengan dunia sosial. Peta kognitif adalah gambar tatanan sosial yang dipegang oleh aktor sosial tertentu. Peneliti mengambil pengertian dari Amitav Acharya tentang konsep *collective identity*.

Menurut Acharya *Collective Identity* sebagai suatu proses dan kerangka kerja di mana negara-negara anggotanya (ASEAN) secara perlahan mulai beradaptasi dengan “keberadaan regional” dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan dalam hubungan antar negara (Acharya 1998, 208).

Menurut Acharya identitas itu penting karena, identitas adalah kunci untuk membangun komunitas ekonomi, sosial budaya dan politik-keamanan. Identitas dikonstruksi secara sosial, menggabungkan logika instrumental dengan sosialisasi bentuk kebiasaan, norma, dan institusi. Lebih dari itu, pembangunan identitas semacam itu tidak sepenuhnya dipisahkan dari ikatan budaya dan sejarah, tetapi diperkuat olehnya. Kedekatan yang sederhana, ikatan sejarah, dan budaya bersama sudah cukup untuk identitas.

Acharya memberikan empat atribut dari konsep *Collective Identity* dalam menyatukan ASEAN, sebagai berikut :

(1) *constitutive norms* atau norma-norma hukum-politik dan sosial-budaya yang telah dikembangkan oleh negara atau suatu kelompok seperti saling menghormati, mengikuti hukum yang telah ditentukan dengan adil, menghormati hak asasi manusia, menghormati hukum moral yaitu saling memahami perbedaan dan menghindari kekerasan.

(2) *social purposes* adalah keinginan bersama untuk mencapai kepada target yang diinginkan bersama seperti kesamaan, kebebasan, perdamaian, sejahtera, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik.

(3) *relational comparisons with other social categories* sebagai komparasi atau perbandingan secara relevan dalam menemukan penyelesaian dari kategori lain yang berupa perbandingan konflik yang dialami oleh suatu kelompok dengan kelompok lainnya untuk menghindari perlawanan secara fisik.

(4) *cognitive models* yaitu suatu kerangka kognitif yang perlu dibangun oleh pemerintah, supaya membangun kesadaran masyarakat atau untuk membentuk kerangka pemikiran agar menghindari kesalahpahaman, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian dimana data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumber atau respondennya. Penelitian ini merujuk kepada masyarakat Melayu berhubungan dengan konflik sosial pada masyarakat melayu Patani di Thailand Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa deskriptif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data yang

bersifat kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan objek latar belakang dan penyelesaian konflik.

c. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

c.1 Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, ensiklopedi, artikel, ataupun media online.

c.2. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, yaitu hasil wawancara dengan responden, sumber data primer penelitian adalah pihak Masyarakat Melayu Patani dan pihak pemerintah yang paham tentang konflik di Thailand Selatan.

1.8.1 Subjek Penelitian

Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. penelitian ini akan menggunakan narasumber yang berupa masyarakat wilayah Thailand Selatan. Level yang akan digunakan adalah level mikro yang merupakan level terkecil dari subjek penelitian, narasumber yang dibutuhkan oleh peneliti tidak kurang lebih dari 10 orang. dari 10 orang tersebut akan berasal dari tiga propinsi Thailand selatan yang berkonflik yaitu propinsi Pattani, Narathiwat, dan Yala.

1.8.2 Alat Pengumpul Data

a. Metode interview

Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi mengenai konflik masyarakat Melayu Patani.

b. Metode observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode ini untuk memperoleh data dan mencatat mengenai konflik Masyarakat Melayu Pattani di Thailand Selatan. Metode ini juga dapat bermanfaat untuk menjelaskan data yang objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.3 Metode analisis data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari

fakta fakta yang khusus, peristiwa peristiwa yang konkrit” kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan konflik masyarakat Melayu Pattani di Thailand Selatan.



BAB II

LATAR BELAKANG KONFLIK DAN FAKTOR PENYEBAB KONFLIK SEPARATISME DI THAILAND SELATAN

Konflik di Thailand Selatan disebabkan karena masyarakat di wilayah tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan kaum mayoritas Thailand, termasuknya cara penyelesaian konflik oleh pemerintah pusat yang masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat lokal. Adanya ketimpangan sosial, ekonomi dan politik hingga munculnya sebagian kelompok orang yang ingin memisahkan diri. Keinginan tersebut ditunjukkan dengan adanya gerakan-gerakan separatisme dan pemberontakan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Bab ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama membahas mengenai latar belakang konflik, bagian kedua membahas mengenai faktor konflik, bagian ketiga membahas mengenai respon pemerintah pusat terhadap insiden besar pada tahun 2004, bagian keempat membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap Thailand Selatan, bagian kelima membahas mengenai respon internasional terhadap konflik di Thailand Selatan.

2.1 Latar Belakang Konflik Thailand Selatan

Thailand Selatan, khususnya provinsi Pattani, Yala, Narathiwat memiliki perbedaan besar secara sosial budaya. Jika wilayah-wilayah Thailand yang lain didominasi oleh etnis Thai yang beragama Buddha, maka wilayah Thailand Selatan didominasi oleh etnis Melayu yang beragama Islam.

Pada awalnya wilayah Thailand Selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan salah satu bagian dari kerajaan Melayu Patani yang memiliki cakupan pusat perdagangan yang cukup luas dengan padatnya di sepanjang Laut Cina Selatan. Masyarakat Melayu Patani sendiri memiliki tiga hal yang menjadi kebanggaan terhadap kaumnya adalah (1) kebanggaan terhadap sejarahnya, (2) kebanggaan sebagai pusat kemakmuran pada salah satu dari Asia Tenggara (*one of the international enterpoly trade of Southeast Asia*) pada abad ke 17, (3) merupakan pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara (*Center for Islamic Studies in Southeast Asia*) pada abad ke 19 [CITATION Jut05 \l 1054]. Namun, pada tahun 1902 bersamaan pada masa kemunduran kerajaan Melayu Patani mengadakan perjanjian Anglo-Siam antar pemerintah Siam dan Inggris yang menyatakan bahwa, wilayah Patani tidak akan menjadi kerajaan tersendiri lagi, karena akan menjadi bagian dari wilayah Thailand atau kerajaan Siam [CITATION Min05 \l 1054].

2.1.1 Kebijakan nasionalisme dan kebijakan asimilasi periode pasca perubahan pemerintahan

Pada saat dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Jenderal P. Phibhulsongkram tahun (1938-1944), mengadakan upaya *Thai-Nationalism* dan upaya asimilasi budaya yang memfokuskan kepada perubahan sosial dan budaya agar mengikuti kaum mayoritas Thai-Budhis di Thailand [CITATION Min05 \l 1054]. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menggantikan hukum Islam menjadi hukum perdata dan hukum komersial yang tidak memuat nilai-nilai keislaman. Adanya hukuman bagi masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu, dilarang

mempelajari kitab Al-Quran dan harus menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa resmi. Mempromosikan agama Buddha dan dilarang berhijab. Beberapa kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai Islam dan kebiasaan masyarakat Melayu sebelumnya.

Di samping menerapkan kebijakan pemerintah sentralistik, pihak Kerajaan Siam menerapkan identitas nasional dengan semboyan “*Thai Identity*” atau (*Eka lak thai*) yang mengakui hanya satu bangsa yaitu bangsa Thai, satu agama Buddha, dan tunduk para kekuasaan Raja [CITATION Min05 \l 1054]. Dari dimensi budaya, identitas tersebut dapat dilihat sebagai bentuk pemaksaan ideologi yang dapat mencabut masyarakat Muslim Patani dari tradisi dan identitas aslinya. Suku atau etnis Muslim Patani yang tidak menginginkan adanya pencampuran kultur Buddha dan Islam, menyebabkan munculnya keinginan untuk memisahkan diri.

Bagian dari kebijakan asimilasi budaya tersebut munculnya tokoh yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat Melayu Patani yaitu Haji Sulong. Pada bulan April tahun 1947, Haji Sulong yang merupakan tokoh penting dalam gerakan separatisme Patani mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah Thailand yaitu: hak menuntut otonomi kepada semua wilayah Melayu Patani, mendesak pemerintah Thailand mengangkat seorang gubernur dari kalangan Melayu Patani untuk menjalankan pemerintahan bersama (*collective*) terhadap empat daerah, di wilayah Selatan yang memiliki mayoritas penduduk suku Melayu, meminta agar bahasa Melayu diakui sama statusnya dengan bahasa Thai dan digunakan sebagai bahasa pengantar bagi sekolah di wilayah Thailand Selatan, mendirikan Mahkamah Islam untuk menjalankan Undang-undang Syariah, menggunakan hasil sumber daya

alam dari daerah-daerahnya untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut [CITATION Chr96 \l 1054].

Haji Sulong merupakan pahlawan penting bagi masyarakat Melayu, tetapi dipandang sebagai pemimpin kelompok separatisme bagi pemerintah. Permintaan Haji Sulong menuntut hak otonomi daerah Melayu ini menyebabkan pihak pemerintah Thailand menangkap Haji Sulong dengan tuduhan penghasutan (*sedition*) dan dihilangkan tanpa jejak pada Januari 1948 [CITATION Chr96 \l 1054]. Pada tahun 1948 juga muncul ketegangan antara masyarakat dan pemerintah hingga menimbulkan aksi kekerasan dikenal sebagai “Pemberntak Dusongnyo”. Kasus Haji Sulong tersebut sama persis dengan kasus Mr. Phaisal Nilapaijit yang merupakan tokoh perjuangan masyarakat Melayu pada tahun 1997 yang dapat tuduhan oleh pemerintah dan dihilangkan jejaknya. Oleh karena itu, kebijakan integrasi pemerintah Thailand mendapat tantangan keras dari masyarakat dan menimbulkan perlawanan separatisme.

2.1.2 Berjalannya Konflik di Thailand Selatan

Bagian dari konsekuensi perlakuan pemerintah, menimbulkan kelompok separatisme. Gerakan pertama yang muncul adalah Gabungan Melayu Patani Raya (GEMPAR), sebuah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1948, memiliki tujuan menyatukan kaum Melayu untuk menuntut kemerdekaan dari Thailand [CITATION Fit16 \l 1054].

Pada tahun 1959, Tengku Abdul Jalil pengikut Haji Sulong mendirikan gerakan perlawanan bawah tanah yaitu *National Liberation Front* (NLF). Kelompok

ini tidak hanya menuntut otonomi seperti sebelumnya tetapi lebih bergeser kepada mendirikan negara Islam. Seiring dengan jatuhnya harga karet dan timah yang menjadi sumber daya utama wilayah saat itu, masyarakat Patani mulai menyadari pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam dan potensi ekonomi mereka tanpa membebrikan kontribusi yang adil kepada masyarakat [CITATION For04 \I 1054].

2.1.2.1 Konflik Fase I (1960-1998)

Setelah munculnya peraturan dari pemerintah Thailand yang mengharuskan pesantren-pesantren di Thailand Selatan mengadopsi kurikulum dan mengurangi bahasa lokal. Ustad Haji Abdul Karim Hasan menyatakan penolakannya dan kemudian membentuk kelompok bersenjata yang bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 1960. Hal yang cukup menarik adalah perjuangannya, BRN tidak hanya mendukung ideologi Islam, tetapi juga ideologi nasionalisme Melayu dan sayap kiri (sosialisme)[CITATION Cha08 \I 1054].

Meskipun BRN cukup berhasil mengganggu stabilitas di Thailand Selatan melalui aksi-aksi bersenjata, kelompok tersebut tidak pernah berkembang menjadi ancaman regional yang serius karena kurangnya dukungan dari masyarakat Thailand Selatan sendiri, khususnya dari kalangan Muslim konservatif yang merasa tidak tertarik dengan ideologi sayap kiri yang didukung oleh BRN. Pada tahun 1968, sejumlah masyarakat Melayu yang merasa aksi-aksi perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat terlalu minim lalu membentuk kelompok pemberontakan baru yang bernama *Patani United Liberation Organization* (PULO: Organisasi Pembebasan Bersatu Patani) [CITATION Cha08 \I 1054].

PULO dalam perkembangannya berhasil menarik perhatian masyarakat lokal Thailand Selatan karena selain melakukan perlawanan bersenjata, kelompok tersebut juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan kepada penduduk lokal. Akhirnya, PULO berhasil dan berkembang menjadi kelompok pemberontakan terbesar di Thailand. Namun, anggota PULO tidak pernah mencapai angka 400 orang, sehingga kelompok tersebut tetap kesulitan melakukan aksi-aksi penyerangan berskala besar. Selama melakukan aktivitas pemberontakan, PULO biasanya menargetkan sasaran-sasaran seperti sekolah, kantor pemerintah, kuil Buddha, dan elemen-elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Selain perbatasan personil, PULO dalam perkembangannya juga harus menghadapi masalah baru berupa konflik internal dalam tubuh keanggotaannya sendiri. Puncak dari konflik internal adalah ketika pada tahun 1993-1995, sebagian dari anggota PULO memutuskan untuk membentuk kelompok baru di mana kelompok tersebut dikenal sebagai *New PULO* (PULO Baru). Ketika dibandingkan dengan PULO, *New PULO* cenderung lebih agresif dan pragmatis karena mereka lebih fokus dalam kegiatan perjuangan bersenjata [CITATION Cha08 \l 1054]

Meskipun ada lebih dari satu kelompok pemberontak yang aktif dalam konflik, konflik di Thailand Selatan pada fase ini masih di skala yang kecil karena masing-masing kelompok hanya bekerja sendiri dan bersaing satu sama lain. Namun, pada tahun 1997, situasinya mulai berubah setelah kelompok-kelompok tersebut sepakat untuk membentuk kelompok pemberontak bersama dikenal sebagai “Bersatu” [CITATION Cha08 \l 1054].

Seiring dengan semakin meningkatkan intensitas konflik sejak terbentuknya “Bersatu”, pemerintah Thailand juga melakukan sedikit perubahan strategi untuk meredam konflik. Pemerintah meminta untuk bekerjasama dengan Mahathir Muhammad perdana menteri (PM) Malaysia saat itu, beliau setuju untuk melakukan kerjasama lintas batas wilayah dengan Thailand. Pemerintah Thailand mendapatkan hasil positif dari kerjasama tersebut karena tokoh-tokoh penting dari kelompok pemberontak Thailand Selatan yang selama ini bersembunyi di Malaysia berhasil diringkus oleh pemerintah Thailand. Sebagai akibatnya, kekuatan “Bersatu” sendiri mengalami penurunan dan Thailand Selatan sempat memasuki periode damai untuk sementara waktu pada masa tersebut.

2.1.2.2 Konflik Fase ke II (2001-2004)

Kembalinya masa damai di Thailand Selatan, pemerintah Thailand memberikan bantuan subsidi kepada Thailand Selatan untuk mengurangi konflik. Pemerintah Thailand berharap kepentingan-kepentingan dari masyarakat Thailand Selatan dapat terakomodasi, maka mereka tidak akan melakukan pemberontakan. Meskipun pada awalnya terlihat menjanjikan, namun kebijakan tersebut dalam praktiknya pemerintah tidak diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang mencukupi, penyerapan masyarakat Melayu ke dalam birokrasi, dan pengurangan pengangguran yang ada di Thailand Selatan. Puncaknya adalah ketika pada tahun 2001, pemerintah pusat Thailand membubarkan Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan (SBPAC) yang diidentifikasi oleh para ahli sebagai puncak *New roun violence* [CITATION Pis09 \l 1054].

Tidak mulusnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Thailand dalam menangani masalah-masalah sosial di Thailand Selatan, lantas diikuti dengan pecahnya kembali aktivitas pemberontakan. Di akhir tahun 2001, lima aksi penyerangan terkoordinir yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang identitasnya tidak diketahui mengakibatkan lima anggota polisi dan satu relawan keamanan desa tewas. Tahun demi tahun berlalu, aksi-aksi penyerangan di Thailand Selatan terus mengalami peningkatan dari sekitar 75 kasus di tahun 2002 menjadi 119 kasus di tahun 2003 [CITATION Jos12 \l 1054].

Memasuki tahun 2004, intensitas konflik masih menunjukkan tren peningkatan. Para pelaku serangan juga mulai berani menargetkan target-target berpengamanan tinggi seperti pos tentara. Bulan Januari 2004 contohnya, sekitar 100 orang bersenjata menyerang pangkalan militer di Thailand Selatan dan merampas persenjataan yang tersimpan di dalamnya. Aksi serupa juga muncul di bulan Maret dan April 2004 dimana dalam aksi-aksi tersebut, para pelaku berhasil mengamankan aneka persenjataan moderen seperti senapan mesin, senapan serbu, peluncur granat berpendorong roket (RPG), dan bahan peledak.

Bulan April 2004 juga menjadi saksi dimana salah satu momen paling kontroversial dalam konflik di Thailand Selatan terjadi. Saat itu tepatnya pada tanggal 28 April, sekitar 100 orang anggota militant separatisme menyerang 10 pos militer di Thailand Selatan. Serangan tersebut berhasil dipatahkan dan sebagian dari para militan tersebut kemudian lari bersembunyi di Masjid Krue Sek, masjid yang sangat sakral oleh penduduk Muslim lokal. Para tentara yang mengejar militant tersebut lalu menembaki masjid dan menewaskan para militant yang bersembunyi di dalamnya.

Peristiwa tersebut langsung memancing kemarahan dari para penduduk Muslim, sehingga sejak saat itu, konflik di Thailand Selatan semakin diwarnai oleh sentimen agama [CITATION Jos12 \l 1054].

Momen kontroversial selama konflik di tahun 2004 belum sampai di situ. Bulan Oktober 2004 di kota Tak Bai, Narathiwat, para penduduk lokal berdemonstrasi menuntut dibebaskannya enam sukarelawan yang sebelumnya ditangkap oleh pejabat pemerintah karena dituduh menyediakan persenjataan untuk pasukan pemberontakan. Respon pejabat Thailand untuk meredam demonstrasi tersebut sangat kejam, bahkan terkesan berlebihan. Ratusan penduduk lokal ditangkap dan diikat sambil dipaksa menanggalkan pakaian bagian atasnya, lalu dimasukkan ke dalam truk dalam kondisi berhimpit-himpitan untuk kemudian diangkut ke pos militer di Patani.

Kontroversi muncul karena di dalam perjalanan, puluhan dari demonstran yang diangkut tersebut belakangan ditemukan meninggal akibat dehidrasi dan kekurangan oksigen dalam perjalanan. Tentara Thailand mendapat kecaman dari masyarakat, bukan hanya dari kalangan Muslim tapi juga dari golongan non-Muslim Thailand. Pada akhirnya ibarat sumbu yang memicu konflik fase baru di Thailand Selatan, yang berskala jauh lebih besar [CITATION Jos12 \l 1054].

2.1.2.3 Konflik Fase ke III (2005 - 2018)

Konflik di fase ini ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok pemberontak berideologi Islam yang baru terbentuk, misalnya Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP), dan Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP). Selain kelompok-kelompok baru tersebut, para “pemain lama” (*old group*) seperti PULO &

BRN mengalami kemunduran karena seiring dengan berkurangnya anggota dan perubahan paradigma. Sebagai gambaran singkat, jumlah anggota pemberontak pada fase ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan konflik pada fase-fase sebelumnya yang hanya melibatkan ratusan orang. Angka perkiraan menyebutkan bahwa jumlah orang yang terlibat dalam aksi-aksi penyerangan & vandalisme pada fase ini berkisar antara 5.000 orang.

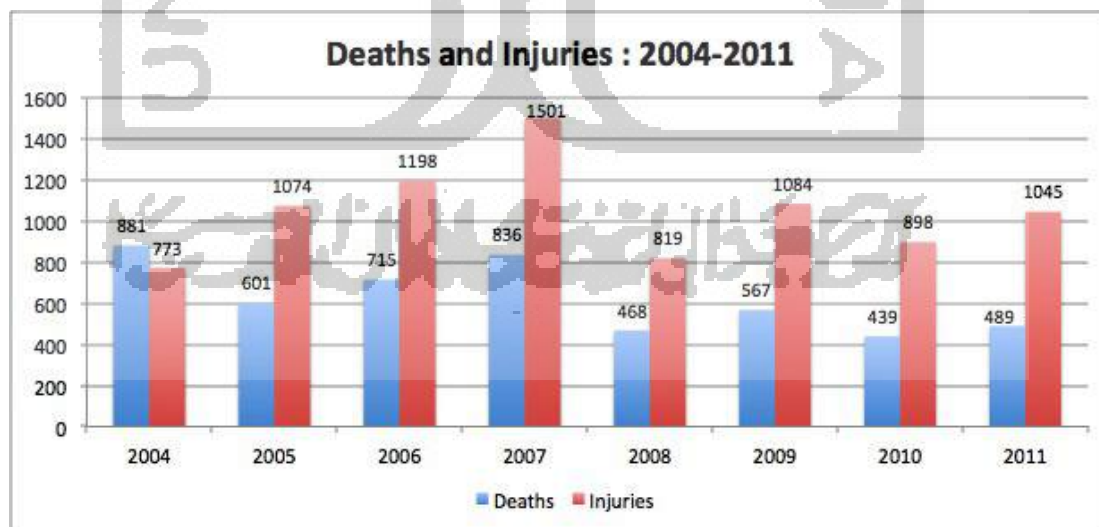
Di medan konflik sendiri, aksi-aksi vandalisme yang dilakukan oleh para pemberontak mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan dengan konflik pada fase sebelumnya. Bulan Februari 2005 contohnya, sebuah bom rakitan seberat 50 kg meledak di perbatasan Thailand-Malaysia. Sebulan kemudian, beberapa buah bom meledak di bandara, supermarket, hotel provinsi Songkhla. Selain melakukan aktivitas pemboman, para milisi pemberontak juga semakin sering melakukan aksi-aksi penembakan dan pemotongan kepala kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk kepada para pemuka agama [CITATION Rep12 \l 1054].

Memasuki tahun 2006, terjadi kudeta militer yang mengakhiri rezim Thaksin. Pihak junta militer yang baru berkuasa awalnya berjanji akan lebih aktif menempuh taktik diplomasi dengan para pemberontak untuk mengakhiri konflik. Namun, di medan konflik sendiri aksi-aksi vandalisme dan penyerangan nyatanya masih belum mengalami penurunan. Salah satu contohnya adalah ketika di bulan Agustus 2006, para pemberontak meledakkan 22 bank di kota Yala. Belakangan, pihak militer Thailand mengakui bahwa masalah terbesar dalam taktik diplomasi adalah karena begitu banyaknya pihak pemberontak yang terlibat dalam konflik, mereka

kebingungan pihak mana yang sebaiknya diajak bernegosiasi [CITATION Rep12 \l 1054].

Tahun demi tahun berlalu selama periode itu, Thailand sempat beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan. Para pemimpin yang berkuasa tersebut juga sempat mengemukakan optimismenya bahwa konflik di Thailand selatan bakal segera berakhir. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera usai. Pada tanggal 9 Februari 2012 lalu contohnya, sebuah bom truk meledak di Thailand Selatan dan mengakibatkan sekurang-kurangnya satu orang meninggal. Sebulan sebelumnya, pasukan Thailand juga sempat terlibat baku tembak dengan pasukan pemberontak di mana pihak Thailand mengklaim, baku tembak tersebut menewaskan empat orang anggota pemberontak [CITATION Rep12 \l 1054].

Grafik1: Jumlah Kematian Berdasarkan Sumber Konflik di Thailand Selatan Tahun 2004-2011



Sumber : [CITATION Pun12 \l 1054]

Namun, jenis kekerasan berupa penembakan, peboman, penegakan hukum oleh pejabat pemerinah, pembakaran dan sebotase.

2.2 Faktor penyebab konflik di Thailand Selatan

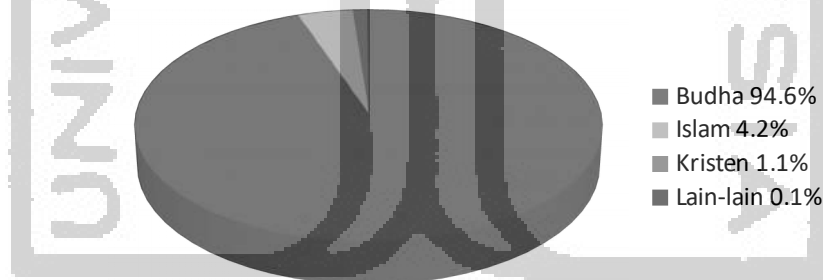
Fisher (2001) memberikan pengertian tentang konflik bahwa kemunculan konflik disebabkan oleh karena adanya identitas yang terancam, berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Gerakan separatisme merupakan bentuk perlawanan budaya akibat adanya sikap diskriminasi [CITATION Fis01 \l 1054]. Wyatt (1967) menyatakan bahwa munculnya gerakan separatisme Patani dilatarbelakangi beberapa hal: pertama, sejarah penaklukan oleh Kerajaan Siam. Patani dahulu merupakan kerajaan yang kuat dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia. Namun, dengan adanya penaklukan oleh Thailand diikuti dengan banyaknya kebijakan dan tata pemerintahan baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya, ditambah adanya benturan kepentingan, maka muncullah gerakan separatisme [CITATION Dav67 \l 1054]. Kedua, kepentingan ekonomi, wilayah Thailand Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup subur, terutama minyak bumi dianggap tidak dapat menikmati hasil sebagaimana orang pribumi. Akses ekonomi hanya dinikmati komunitas lain. Ketiga, migrasi internal, adanya program migrasi internal dengan kebijakan pemindahan

paksa seluruh penduduk Melayu Muslim ke Selatan mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi dan juga kesenjangan politik antara komunitas Muslim Melayu Thailand dengan komunitas non-Muslim [CITATION Min05 \l 1054].

Adapun faktor-faktor penyebab konflik di Thailand Selatan dapat dibedakan menjadi faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi sebagai berikut :

Jumlah pemeluk agama Buddha merupakan agama mayoritas dibandingkan agama Islam dan agama lain di Thailand. Jumlah pemeluk agama Budha dari survei Kantor Statistik Nasional (2015) memiliki di sekitar 94.6 persen di banding pemeluk agama Islam yang memiliki hanya jumlah 4.2 persen pada seluruh Thailand.

Grafik 2. Diagram Pemeluk Agama Mayoritas dan Minoritas di Thailand



Sumber : [CITATION NSO15 \l 1033]

Berikutnya, adalah tabel jumlah pemeluk muslim di berbagai wilayah di Thailand yang menunjukkan bahwa Thailand Selatan memiliki jumlah Muslim yang

beretnis Melayu lebih banyak yaitu sekitar 80.9 % dibanding wilayah lain di Thailand yang hanya 19.1 % penduduk Muslim, sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah dan Persentase Muslim di Berbagai Wilayah di Thailand

Wilayah	Jumlah	Persentase
Bangkok	262.023	9.4
Wilayah Tengah	220,414	7.9
Wilayah Utara	30,637	1.1
Wilayah Timur	18,069	0.7
Wilayah Selatan	2,246,399	80.9
Total	2,777,542	100.0

Sumber : [CITATION NSO02 \I 1033]

Secara geografis Thailand Selatan (Patani) diklaim sebagai wilayah kerajaan Thai tetapi secara demografis dan kultural Patani selalu dilihat sebagai bangsa lain yang kehadirannya dianggap mengganggu keutuhan bangsa itu, akibatnya mereka didiskriminasi karena berbeda ras berbeda etnis, dengan demikian juga beda kultur. Perbedaan itu, yang membuat pemerintah Thai bersikap diskriminatif bahkan cenderung diekpresikan dengan tindak kekerasan baik yang terbatas maupun massa.

Gambar 4 : Etnis Melayu di Thailand Selatan



Sumber : [CITATION Rep12 \l 1033]

Selain agama, etnis, bahasa, dan budaya yang merupakan sumber masalah, di tiga provinsi Selatan juga memiliki masalah kemiskinan, pengangguran, dan tingkat pendidikan dan GDP yang masih rendah. Kekurangan memberi perhatian dari pemerintah pusat kepada wilayah tiga provinsi Selatan merupakan titik perasaan diskriminasi bagi masyarakat wilayah Patani, Yala, dan Narathiwat. Adanya asimilasi dan dominasi dari pemerintah pusat, semakin mempersulit penduduk Thailand Selatan dalam proses pembangunan dan kesejahteraan.

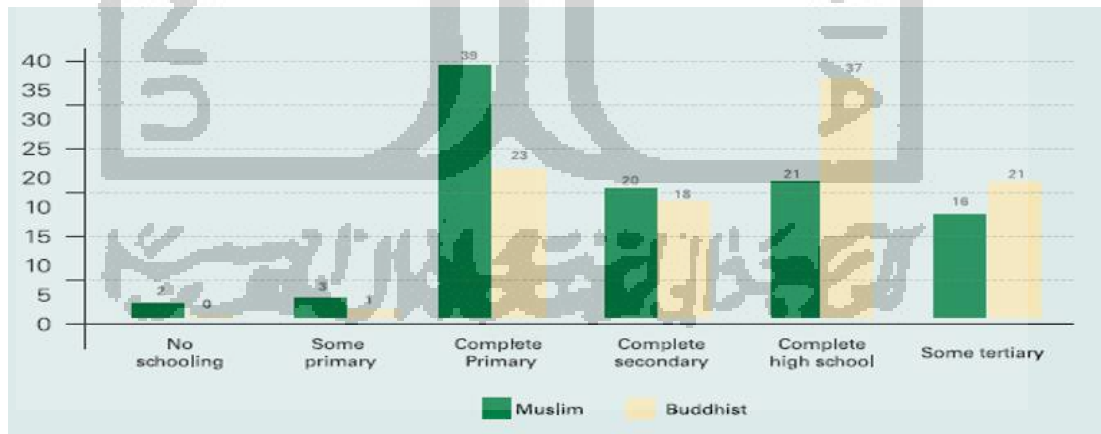
Tabel 5 : Pendapatan Perkapita Rata-Rata Penduduk di Thailand Selatan

Southern Region Province	GDP per capita :	Population: (thousands)
1. Chumphon	143,544	9,210
2. Ranong	168,460	488
3. Surat Thani	100,720	255
4. Phang Nga	191,927	1,047
5. Krabi	237,971	269
6. Nakhon Si Thammarat	234,436	373
7. Trang	98,627	1,526
8. Phuket	107,720	625
9. Phatthalung	357,498	536
10. Satun	69,159	508
11. Songkhla	124,400	281
12. Pattani	157,029	1,539
13. Yala	86,571	627
14. Narathiwat	98,562	446
	61,115	689

Sumber : [CITATION Tha161 \ 1033].

Berdasar tabel tersebut wilayah tiga provinsi Selatan berada di nomor 12,13,14 memiliki jumlah GDP yang masih rendah dibanding wilayah Selatan lainnya yang tidak berkonflik. Berdasarkan yang dilaporkan oleh *National Economic and Development Boards* (NESDB) Thailand, pendapatan perkapita rata-rata dari tiga provinsi Selatan yaitu Pattani Yala dan Narathiwat termasuk yang terendah di seluruh Thailand, kurang dari 73 ribu Bath pertahun di provinsi Pattani, dan 55 ribu Baht pertahun di provinsi Yala. Selain itu NESDB juga melaporkan bahwa Narathiwat merupakan provinsi termiskin di Thailand Selatan dengan 46% dari populasi berada di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 193 ribu orang memperoleh pendapatan bulanan 808 Bath di bawah rata-rata penduduk Thailand lainnya [CITATION Pun15 \ 1033].

Grafik 6 : Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk di Thailand Selatan



Sumber : [CITATION Pra10 \ 1033]

Selain masalah kemiskinan termasuk juga masalah tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah. Terdapat hasil dari proyek survei kualitas hidup masyarakat di tiga provinsi Selatan (PSKM) pada tahun 2009, ditemukan bahwa mayoritas populasi usia sekolah di tiga provinsi Selatan rata-rata hanya menyelesaikan sekolah dasar, pendidikan lebih lanjut dalam pendidikan tinggi secara bertahap memiliki jumlah yang menurun, baik di tingkat menengah maupun tersier, terutama populasi Muslim [CITATION Pra10 \l 1033].

Berdasar laporan tersebut, menunjukkan bahwa masalah pendidikan di wilayah tiga provinsi Selatan masih ada. Meskipun telah banyak lembaga pendidikan agama terbuka di seluruh wilayah, maupun beberapa tempat dapat dianggap sebagai lembaga pendidikan berkualitas bagi masyarakat Thailand Selatan. Seperti yang di laporkan oleh Decha Hanhaboon (2010), mengatakan bahwa sekolah swasta yang mengajarkan agama Islam bersama-sama dengan mata pelajaran umum, memiliki banyak sekolah terkenal seperti Thamwittaya school, sekolah Phatthana Wittaya dan Darussalam Atthagiyah, siswa yang lulus dari sekolah ini dapat belajar di semua cabang universitas di negara termasuk banyak universitas asing [CITATION Dec10 \l 1033].

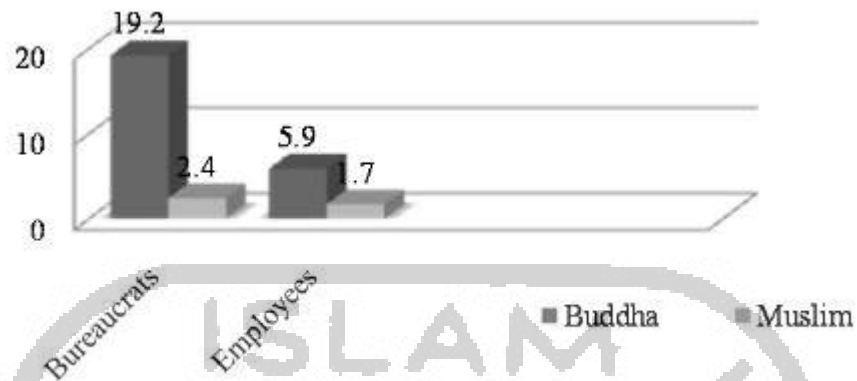
Ketika mempertimbangkan sistem pendidikan wilayah Selatan dengan wilayah lain, wilayah Selatan masih kurang bersekolah dari yang seharusnya, terutama di pendidikan menengah (SMP, SMA) dan pendidikan tinggi seperti universitas jumlah peserta cenderung menurun. Konsekuensi dari rendahnya pendidikan ini juga pasti akan berdampak pada pengangguran dan juga

ketidakmerataan ekonomi. Oleh karena itu wilayah Selatan masih butuh perhatian dari pemerintah pusat.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Thailand Selatan dilatarbelakangi oleh adanya penghapusan pendidikan tradisional melayu oleh pemerintah Thailand yang mengembangkan kebijakan asimilasi dan memasukkan pendidikan semisekuler di lingkungan pondok dan kewajiban penggunaan bahasa Thai dalam proses pembelajaran. Sistem pendidikan seperti ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Thailand Selatan, sehingga terjadi pengurangan semangat untuk memperoleh pendidikan tinggi [CITATION Dec10 \l 1033].

Pada sektor pekerjaan penempatan penduduk Buddha dan Muslim atas sektor publik, yakni penduduk Buddha yang mengisi jabatan birokrat jauh lebih besar dari penduduk Muslim. Padahal sebagian besar penduduk di wilayah Selatan merupakan mayoritas Muslim. Penduduk Buddha yang mengisi jabatan sebagai birokrat jauh lebih besar yaitu sekitar 19.2 persen, sedangkan jumlah Muslim yang mengisi jabatan sebagai birokrat di sekitar 2.4 persen. Begitupun dalam bidang-bidang pekerjaan yang lain, yakni sebagai berikut:

Grafik 7: Penempatan Budha dan Muslim Pada Sektor Publik di Thailand Selatan



Sumber : [CITATION Sri06 \l 1033]

Ketidaksamaan tersebut memicu kepada pembunuhan masyarakat Buddha di wilayah Selatan oleh kelompok separatisme untuk menambah peluang bagi masyarakat Melayu dalam pekerjaan birokrat.

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab konflik selain sejarah zaman dulu, termasuk juga faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi. Secara sosial, terancamnya budaya etnik Muslim-Melayu karena dibentuknya sistem administrasi terpusat, diterapkannya asimilasi serta sekularisasi sekuler. Secara politik, disebabkan karena adanya beberapa kebijakan pemerintah yang mengancam masyarakat. Secara ekonomi, adanya kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran antara wilayah di Thailand Selatan dan wilayah Thailand lainnya.

2.3 Respon Pemerintah Pusat terhadap Insiden-Insiden tahun 2004

Pada tahun 2004 yang merupakan tahun sumber kekerasan di Thailand Selatan. Pemerintah Thaksin Shinawatra (PM) pada masa tersebut membentuk “Komisi Independen untuk Menyelidiki Fakta tentang insiden Masjid Kreu Sek” (คณะ

กรรมการอิสระได้สวนข้อเท็จจริงกรณีมีสียึดหรือเชะ). Suara mayoritas dari dewannya menyatakan bahwa pejabat pemerintah perlu menggunakan senjata untuk melindungi dirinya dan masyarakat yang tidak bersalah. Untuk mengakhiri insiden masjid Kru Sek, lebih tepat menggunakan alat-alat kekerasan dan senjata berat untuk mengakhiri insiden. Namun, insiden tersebut berlaku dibawah perintah Jenderal Punnarin Manee, Wakil Direktur Divisi Keamanan Internal (ISOC) dan Kolonel Manas Kongka, komandan Pasukan Khusus Provinsi Pattani [CITATION Jan16 \l 1054].

Pada tanggal 28 November 2006, dua tahun setelah insiden Kru Sek pengadilan provinsi Pattani mengajukan 32 investigasi kriminal Masjid Kru Sek. Tetapi perintah pengadilan ditutup. Namun, proses untuk menuntut keadilan untuk korban memiliki proses yang sangat sulit bagi masyarakat dalam melakukan petisi kematian tersebut dan mayoritas menyerah dengan tidak menuntut [CITATION Jan16 \l 1054].

Pada 10 Februari 2009 kantor kejaksaan agung oleh Mr. Valee Lertrakul, wakil jaksa agung bertindak sebagai jaksa agung mengirimkan surat petisi ke Mrs. Angkana Neelapaijit, sebagai kelompok kerja untuk keadilan dan perdamaian (KKP). Surat tersebut diperintah kepada kelompok KKP yang selama ini mendukung masyarakat untuk mengajukan tuntutan kasus kematian di Masjid Kru Sek bahwa, kantor jaksa agung menyatakan kasus kematian di Kru Sek dianggap tidak ada perintah untuk menuntut.

Sidang untuk mengadili para tentara yang dituding bertanggung jawab atas insiden tersebut sempat dilangsungkan, namun para terdakwa ternyata hanya

menerima vonis hukuman ringan. Kemudian, masih banyaknya misteri yang menyelimuti insiden tersebut, insiden-insiden kontroversial yang melibatkan tentara Thailand tersebut [CITATION Jos12 \l 1054]. Namun, kasus insiden Tak Bai pun mengalami sama statusnya dengan kasus masjid Krue Sek.

Selain kasus Masjid Krue Sek, muncul kekerasan besar di distrik Saba Yoi, Provinsi Songkhla. Ada sekitar 20 pemuda, mengendarai sepeda motor ke unit layanan umum yang dilengkapi dengan pisau, ada dua orang yang kelihatannya ingin menyerang pejabat pemerintah maka mereka ditembak oleh pejabat pemerintah hingga akhirnya pemuda 19 orang tersebut meninggal.

Pada tanggal 19 September 2008, mengadakan otopsi oleh dokter bahwa 19 orang yang meninggal dikarenakan ditembak mati oleh polisi dengan mengklaim bahwa pelaksanaan tugas. Investigasi kematian oleh pejabat pemerintah terhadap kejadian pada 28 April 2004 tersebut menjadi kritikan tentang keadilan oleh masyarakat bahwa masyarakat merasa tidak adil dalam pemeriksaan dari pemerintah

Pornpan Khongkasai sebagai anggota *Mixed Culture Foundation* (MCF), memberi pendapat tentang korban dari insiden Masjid Krue Sek dan 19 orang korban di distrik Saba Yoi memiliki bukti yang jelas bahwa kematian tersebut dikarenakan pejabat pemerintah melakukan tindakan yang berlebihan hingga munculnya kematian. Akan tetapi, proses melanjutkan penyelidikan kematian tidak dilanjutkan oleh pemerintah.

Pendapat Pattama Pimmiya sebagai ketua desa distrik Saba Yoi, ia merupakan salah satu pembantu tentang proses kematian pada insiden tersebut menyatakan bahwa, sebenarnya masyarakat lokal masih memiliki trauma dengan ketidakadilan

pemerintah, tidak ada yang memperhatikan kesedihan masyarakat. Sama statusnya dengan insiden Masjid Krue Sek, masyarakat masih ingat tentang kekerasan tersebut, masyarakat masih mempersoalkan mengenai kekerasan yang berlebihan. Namun beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti mempromosikan tempat wisata dan membangun industry bukan kebijakan utama yang diinginkan masyarakat. Masyarakat ingin mengadakan investigasi, tetapi tidak ada kesempatan untuk menuntut, kata Pattama pada tahun 2011 [CITATION Jan16 \l 1054].

2.4 Kebijakan Pemerintah terhadap Konflik di Thailand Selatan

Berikut ini, adalah dua kebijakan penyelesaian konflik yang berdampak negatif dari pada dampak positif. Pertama, Perdana Menteri Thaksin Shinawatra saat itu, memobilisasi lebih banyak personel militer di area konflik dan hampir 70.000 anggota tentara pro-pemerintah yang diterjunkan sejak tahun 2004. Namun, minimnya ketrampilan pasukan tentara dalam metode-metode anti-teror dan buruknya rasa saling pengertian dengan penduduk lokal menyebabkan upaya para tentara untuk meredam konflik menjadi tidak efektif.

Kedua, pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum khusus, hukum khusus tersebut merupakan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat pemerintah “khusus” dalam pencarian, penangkapan, penahanan, penyelidikan dan pemeriksaan masyarakat untuk mengendalikan konflik. Hukum khusus tersebut menurut organisasi *Human Right Watch* (HRW) merupakan hukum yang melanggar hak asasi manusia, contohnya ketika pejabat pemerintah menuduh seseorang melakukan pelanggaran hukum, pejabat dapat mengendalikan orang tersebut selama tujuh hari dan melarang

untuk dikunjungi selama tiga hari, hal tersebut bertentangan dengan proses hukum pidana negara.

Adanya hukum khusus ini, pejabat pemerintah sering menangkap masyarakat tanpa kesalahan yang terbukti, ketika tidak ditemukan kesalahan, pejabat hanya membebaskan masyarakat tanpa pemberian kompensasi atau permohonan maaf sebagai bentuk kelalaian dalam bertugas. Hal tersebut menimbulkan perasaan diskriminasi bagi masyarakat di tiga provinsi Selatan. Akibat dari diskriminasi tersebut menimbulkan perspektif identitas yang berbeda “*Aku Melayu, Kamu Siam*” menjadi alasan untuk membentuk kelompok separatisme di daerah Selatan. Meskipun, pemerintah sudah berupaya memberikan bantuan subsidi untuk memperbaiki tempat wisata dan membangun industri untuk memanfaatkan sumber daya serta meningkatkan ekonomi di Thailand Selatan, namun konflik masih dapat di rasakan hingga saat ini.

Dari problem rasial seperti yang telah disebutkan di atas, timbullah pengelompokan kaum muslim di Thailand menjadi dua golongan, sebagai berikut :

2.4.1. *Assimilated group* atau golongan yang terasimilasi atau bergabung dengan kaum mayoritas yaitu bergabung dengan masyarakat Thai-Budha pada segala bidang tatanan kehidupan yakni tidak sampai pada masalah keagamaan dan masalah lainnya. Biasanya kelompok ini tidak pernah mengalami kekerasan secara langsung.

2.4.2. *Unassimilated group* atau golongan yang tidak berbaur dengan kaum mayoritas, hingga ingin memisah diri. Golongan tersebut lebih menunjukkan kultur Melayu Islam pada bahasa dan adat. Golongan ini bertempat tinggal di daerah Yala, Narathiwat dan Pattani.

2.5 Respon Pihak Internasional Terhadap Konflik di Thailand Selatan

Puncak kekerasan di Thailand Selatan pada tahun 2004, ditandai dengan tiga peristiwa penting, yakni serangan Pada tanggal 4 Januari 2004, terjadinya perampokan senjata atau insiden (*Plon Peun*), serangan terhadap Masjid Kreu Sek pada tanggal 28 April 2004 dan insiden kekerasan di Tak Bai pada tanggal 25 Oktober 2004, telah memakan ratusan korban jiwa, sedangkan sekitar 1.300 orang Muslim ditangkap dan dibawa ke kamp militer. Kejadian ini menimbulkan kontroversi besar. Spekulasi mulai bermunculan di antaranya tuduhan kekerasan yang berlebihan, metode yang terlalu keras, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Hal tersebut menarik perhatian Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus pada hak asasi manusia kelompok minoritas, OKI terlibat dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan kelompok separatisme Thailand Selatan. Atas mandat yang di terima oleh OKI berdasarkan Piagamnya, OKI melindungi hak-hak muslim minoritas dan masyarakat non-anggota, dan untuk menjalankan mandatnya ini, OKI memiliki misi untuk menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan melakukan intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama yang mengikat muslim secara bersama.

Professor. Ekhmelden Ihsanoglu Sekretaris Jenderal OKI saat itu mengecam kejadian yang menewaskan masyarakat Thailand Selatan. OKI menyerukan negosiasi

dan dialog damai untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim Patani di Thailand Selatan. OKI juga menyerukan kepada pemerintah Thailand agar memperlakukan masyarakat Muslim di Thailand Selatan sejajar dengan warga negara yang lainnya [CITATION lmt09 \l 1033].

Pada tahun 2005, OKI berkunjung ke Thailand Selatan untuk meninjau kondisi konfliknya. Sesuai dengan kerangka kerja yang dimiliki oleh OKI untuk melakukan resolusi konflik, para delegasi OKI memulainya dengan pengumpulan fakta-fakta. Dari data yang mereka temukan, para delegasi menyimpulkan bahwa kerusuhan di Thailand berakar pada pengabaian budaya wilayah Selatan oleh pemerintah. Hal ini yang sebenarnya memicu konflik hingga terjadi sampai saat ini [CITATION OKI06 \l 1033].

OKI dengan pemerintah Thailand guna mencari solusi untuk Thailand Selatan. Pada tahun 2009, OKI juga berupaya mengikutsertakan kelompok pemberontak ke dalam proses perdamaian. Pertemuan OKI dengan kelompok separatis dimulai dari PULO. Presiden PULO, Al Haj Abu Yasir Fikri diundang ke Kesekretariatan OKI di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 18-19 April 2009 . Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PULO menyebutkan bahwa untuk memahami permasalahan yang sebenarnya di Thailand Selatan, semua pihak harus melihat akar permasalahan yang lebih mendalam. Thailand melihat wilayah Selatan sebagai bagian wilayahnya, namun gerakan-gerakan pembebasan melihat Thailand sebagai kekuatan kolonial yang menduduki tanah mereka dengan paksa, tidak mengakui keberadaan

identitas etnis Melayu, sehingga menimbulkan hambatan yang besar untuk berdampingan hidup secara damai [CITATION MFA09 \l 1033].

Setelah mendengarkan pandangan dan komentar dari perwakilan PULO, OKI mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 23-25 Mei 2009 di Damaskus, Suriah. Inti dari rekomendasi tersebut adalah OKI menyayangkan belum adanya kemajuan dari komitmen pemerintah Thailand untuk mengatasi konflik sejak diangkatnya isu Thailand Selatan di konferensi OKI tahun 2006. Sekretaris Jendral OKI juga mengundang negara-negara anggota yang memiliki hubungan kuat dengan Thailand untuk membantu negara tersebut mengimplementasikan secara penuh kesepakatan yang telah terbentuk yang akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan perdamaian di Thailand Selatan, dalam hal ini adalah Malaysia yang kedepannya akan menjadi mediator dan fasilitator dalam negosiasi antara pemerintah Thailand dan perwakilan kelompok separatisme [CITATION MFA09 \l 1033].

BAB III

ANALISA SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK DI THAILAND SELATAN: MELALUI PENDEKATAN TEORI *COLLECTIVE IDENTITY*

Pada bab ini akan membahas terkait analisa konflik di Thailand Selatan melalui teori *collective identity* sebagai alternative penyelesaian konflik yang telah berjarak sekitar 15 tahun dan telah merugikan masyarakat di wilayah Thailand Selatan. Konflik ini mengakibatkan dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat serta memunculkan pemberontak baru atau *New round of violence*.

Fenomena *New round of violence* mulai pada tanggal 4 Januari 2004 (perompakan senjata), dibawah kepemimpinan perdana menteri Thaksin Shinawatra, ia menargetkan solusi konflik kepada pemain yang mengatur di belakang yaitu kelompok separatisme “Bersatu” yang mengadakan pembicara secara sembunyi *Peace talk* dengan wakil separatist Dr. Kader Jehman. Pemerintah berkali-kali mengadakan pembicara tersebut, hingga munculnya *Peace plan* pada tahun 2006.

Peace plan tersebut ditandatangani oleh semua wakil kelompok separatisme di bawah payungnya “Bersatu” yaitu Ustaz Muhammad bin Abdul Rahman presiden grup GGP, Mrs. Rossi bin Hassan wakil presiden grup PULO, Ustaz Abdullah bin Ismail presiden grup BRN, yang terakhir adalah Dr. Kader Jehman yaitu presiden

kelompok Bersatu. Akan tetapi, semua rencana tersebut gagal karena departemen keamanan Thailand telah menilaikan bahwa gerakan-gerakan ini bukan lagi mesin utama yang mendorong *New round of violence* sejak insiden perampokan senjata tahun 2004.

Kegagalan pemerintah dalam mengatasi kekerasan sehari-hari dalam bernegosiasi dengan wakil-wakil “Bersatu” menyebabkan pemerintah pusat mengelompokkan kelompok “Bersatu” menjadi “*old group*” yang tidak mempengaruhi kepada situasi kekerasan sehari-hari zaman sekarang lagi. Pada beberapa tahun ini *New round of violence* diklasifikasi oleh pemerintah menjadi para “pemberontak”. Pemberontak *New round of violence* adalah kelompok gelombang baru yang dijalankan oleh remaja-remaja ekstrimis, dimana merupakan konsekuensi dari kesalahan kebijakan oleh pemerintah pusat [CITATION Pak14 \l 1033].

Dampak konflik yang dirasakan menurut hasil *Peace Survey* oleh *Southern Conflict and Cultural Diversity Research Institute Prince of Songkla University* dengan mengumpulkan data dari masyarakat dan para pemimpin lokal mengatakan bahwa dampak yang ditemukan dibawah situasi konflik adalah dampak perekonomian yang tidak ada investor yang ingin menginvestasi di tiga provinsi Selatan, termasuk kekurangan pekerjaan dikarenakan perekonomian tidak stabil, kekurangan keterampilan menyebabkan pendapatan masyarakat di provinsi Selatan masih rendah. Namun, dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat dan pemimpin lokal adalah dampak keamanan dan properti. Kemudian dampak tertinggi yang dialami oleh para pemimpin adalah dampak kesehatan dan mental. Pada masalah

kehidupan sehari-hari hasil masyarakat lokal dan para pemimpin lokal memiliki perasaan tidak aman jika ingin keluar dari tempat tinggal [CITATION Chu17 \l 1033].

Menurut Dr. Panitan Wattanayakorn, sarjana keamanan dari Universitas Chulalongkorn, memberi pendapat tentang konflik di wilayah tiga provinsi Selatan bahwa kekerasan yang terjadi di masa lalu telah menciptakan dua gambaran yang tumpang tindih. Pertama, masyarakat tidak percaya dengan keselamatan, yang ke dua adalah gambaran pejabat pemerintah yang tidak dapat melindungi masyarakat. Karena lebih sulit melindungi diri sendiri, menyebabkan harapan masyarakat terhadap pejabat pemerintah dalam melindungi mereka berkurang.

3. Analisa konflik dan solusi konflik melalui pendekatan *collective identity*

Telah dijelaskan bahwa konflik di Thailand Selatan tidak begitu mudah dalam memahaminya, karena konfliknya telah memakan waktu jangka panjang hingga sekarang belum dapat diselesaikan. Dalam sub bab ini peneliti akan mencoba untuk menyesuaikan teori *collective identity* dengan kondisi konflik di Thailand Selatan dan memberi pandangan dari konstruktivis yang perlu dipelajari oleh pemerintah.

(3.1) *constitutive norms* atau norma-norma hukum-politik dan sosial-budaya yang telah dikembangkan oleh Thailand seperti saling menghormati, mengikuti hukum yang telah ditentukan dengan adil, menghormati hak asasi manusia, menghormati hukum moral yaitu saling memahami perbedaan dan menghindari kekerasan.

Pada hasil wawancara dari mantan presiden kelompok separatis *old group* dapat dipahami bahwa sebelumnya pemerintah pusat tidak begitu serius dalam menyelesaikan konflik, contohnya pemerintah mengeluarkan hukum khusus di tiga provinsi Selatan yang memberikan hak wewenang berlebihan kepada pejabat pemerintah. Disini tidak sedikit pejabat pemerintah melanggar hak asasi manusia masyarakat. Kemudian, termasuk juga kebijakan menurunkan tentara ke tiga provinsi Selatan, disini dapat dilihat bahwa pemerintah masih diskriminasi dengan masyarakat Melayu (*have no trust each other*), menurunkan tentara kepada tiga provinsi Selatan membuat masyarakat Selatan merasa bahwa pemerintah memandang situasi Thailand Selatan sebagai ancaman stabilitas yang perlu dingatasi oleh tentara, padahal mayoritas masyarakat Melayu bukan kelompok separatisme [CITATION Dee11 \ 1033].

Namun, telah banyak penelitian yang menawarkan penyelesaian konflik dengan memberikan otonomi khusus kepada tiga provinsi Selatan. Berdasarkan salah satu penelitian yang di tuliskan oleh Duncan McCargo, 2008 yang berjudul *Tearing Apart the Land: Islam and legitimacy in Southern Thailand* [CITATION Dun12 \ 1033]. Dan *Mapping National Anxieties: Thailand's Southern conflict* tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa McCargo menawarkan pemerintah untuk memberi otonomi kepada tiga provinsi Selatan [CITATION Mcc09 \ 1033].

Dari hasil wawancara mantan presiden kelompok separatis *old group*, ketika dipertanyakan tentang otonomi khusus, ia bertentangan dengan otonomi khusus karena, otonomi khusus tidak dapat menyelesaikan masalah, lebih dari itu akan

menciptakan lebih banyak masalah karena otonomi khusus akan mendukung mereka (Gerakan pemberontak baru) sebagai langkah pertama sebelum melangkah ke memisahkan diri yang merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah.

Isu tersebut terdapat dua dimensi, pertama telah kita memahami bersama bahwa gerakan pemberontak baru memiliki tujuan untuk memisahkan diri, dimana hal tersebut sangat bertentangan oleh pemerintah pusat. Kedua, otonomi khusus bukan upaya yang diinginkan oleh masyarakat Patani, karena otonomi khusus menurut masyarakat Patani bukan hal yang mudah dalam membentuknya, otonomi khusus tersebut butuh pemimpin, dan kebutuhan pemimpin tersebut mudah saja munculnya konflik antar masyarakat Melayu sendiri. Sedangkan hasil penilaian oleh *Southern Conflict and Cultural Diversity Research Institute Prince of Songkla University* 2018, menyebutkan hasil keinginan masyarakat untuk mengadakan otonomi khusus di sekitar 10.9% saja. Solusi paling efektif adalah pemerintah Thailand harus membuat kebijakan yang diinginkan masyarakat Melayu yang mayoritas masyarakat ingin adalah “memahami bersama” atau solusi-solusi yang berkelanjutan [CITATION Chu17 \I 1033].

Pada tahap *constitutive norms*, langkah yang penting bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah adalah saling memahami dan menghormati, peneliti mencoba untuk memberikan saran upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah, sebagai berikut :

3.1.1. Mencabutkan atau mengurangi tentara dari tiga provinsi Selatan, hal ini peneliti telah mewawancarai masyarakat, hasil dari mayoritas masyarakat setuju bahwa mereka ingin pemerintah mencabutkan tentara, karena adanya tentara tersebut mereka lebih merasa tidak aman dengan adanya tentara, hak-hak kebebasan mereka terganggu. Seperti adanya kamp-kamp tentara di setiap satu kilometer di pinggir jalan yang bertugas untuk memeriksa masyarakat. Adanya tentara tersebut masyarakat didiskriminasi oleh pemerintah yang memandang situasi di tiga provinsi selatan sebagai ancaman. Namun, keadaan tentara mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, sebaliknya keadaan tentara tersebut tidak memberikan perasaan aman kepada masyarakat.

Namun, anggaran negara untuk wilayah tiga provinsi Selatan sebenarnya memiliki jumlah yang besar. Akan tetapi, penggunaan dana tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat karena dana tersebut hanya untuk gaji tentara. Membuat anggaran dari pemerintah tidak berdampak positif bagi masyarakat.

3.1.2. Menbatalkan hukum khusus yang memberikan hak wewenang berlebihan kepada pejabat pemerintah, hukum ini telah dicatat oleh organisasi *Human Right Watch* bahwa melanggar hak asasi manusia masyarakat di tiga provinsi Selatan, karena telah banyak pejabat pemerintah menangkap dan menyiksa masyarakat tanpa bukti kesalahan yang nyata dibawah hukum khusus tersebut.

Dari hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa masyarakat merasa diskriminasi dengan adanya hukum ini, karena hukum khusus tersebut tidak

menghormati hak asasi manusia dan menurut mayoritas masyarakat mengatakan bahwa hukum ini bukan cara penyelesaian konflik yang tepat. beberapa masyarakat mengatakan bahwa adanya hukum ini semakin menambah perasaan diskriminasi. Tidak sedikit masyarakat ditangkap ke kamp tentara tanpa bukti kesalahan yang nyata, seperti kasus besar-besaran pada bulan Agustus 2019 yang lalu, Abdullah E-musa di distrik Saiburi, provinsi Pattani, ia ditangkap ke kamp tentara karena ia tersangka sebagai pendukung pihak pemberontak. Setelah keluar dari kamp tentara, Abdullah dengan kondisi kekurangan oksigen akhirnya meninggal. Dari hasil wawancara saudara Abdulah di berita, ia mengatakan bahwa di distrik Saiburi merupakan “wilayah merah”, siapa yang kondisinya sedang berkerja terutama laki-laki, mau tidak mau harus bersiap untuk ditangkap [CITATION Kha19 \ 1033].

Pada kasus di atas dapat dianalisa bahwa, strategi pemerintah kurang fleksible. Dapat dilihat dari hasil wawancara Jenderal Waipoch bahwa pemerintah hanya melihat ancaman di tiga provinsi Selatan sebagai *Traditinal Threat* maka hasil strateginya adalah menurunkan tentara dan mengeluarkan hukum khusus yang memaksa masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Suatu hal yang menjadi masalah adalah pemerintah yang terlibat dalam membentuk strateginya, tidak memahami situasi yang sebenarnya dan tidak memahami keinginan masyarakat lokal, karena pemimpin provinsi seperti gubernur selalu merupakan orang dari luar provinsi Selatan [CITATION Dee11 \ 1033].

Dari hasil wawancara oleh Kepala Desa dari provinsu Pattani, bahwa beliau sebagai kepala desa yang memahami masalah konflik dan usaha untuk mengajukan

keinginan masyarakat kepada pemerintah pusat, tetapi akhirnya hal-hal yang diajukan tidak dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah masih tetap menggunakan strategi sebelumnya, padahal yang menjadi masalah sekarang bukan masalah tradisional lagi. Pemerintah tidak ingin mengdesentralisasi strateginya, seperti yang dikatakan oleh Jenderal Waipoch bahwa strategi *one size fit all* bukan cara yang paling tepat dalam menyelesaikan konflik yang kompleks di tiga provinsi Selatan. Masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah adalah memenangkan perasaan masyarakat.

Menurut pandangan Jenderal Waipoch, terlihat bahwa salah satu kekurangan utama untuk perumusan strategi yang benar belum terbentuk yaitu kemauan pemerintah atau *Political Will*. *Political Will* itu penting terbentuk bagi pemerintah untuk lebih minat dalam menyelesaikan konflik. Ketika kehendak pemerintah atau *Political Will* berkurang, maka kualitas penyelesaian konflik juga terdapat berkurang.

Dari berbagai hasil wawancara, peneliti menemukan jawaban yang menyatakan bahwa pemerintah kurang serius dalam menyelesaikan masalah yang sebenarnya ada solusinya. Selama ini pemerintah mengeluarkan strategi atau kebijakan yang kurang diterima oleh masyarakat. Meskipun telah ada beberapa kebijakan yang menyenangkan masyarakat seperti memberi dana untuk haji dan memberi subsidi untuk keluarga korban konflik. Kebijakan tersebut bukan penyelesaian dari akar masalahnya tetapi dari puncak masalah. Keinginnan masyarakat sebenarnya adalah kesamaan, keadilan, dan saling menghormati. Pemerintah sendiri belum memberikan perhatian tentang hal tersebut karena tidak saling memahami (*have no trust each other*) [CITATION Dee11 \ 1033].

Menurut Jenderal Ekachai Srivilat, Direktur Biro Perdamaian dan Pemerintahan Institut Raja Prajadhipok, ia telah melakukan proses pembicaraan damai selama bertahun-tahun, di tiga provinsi Selatan dan daerah berkonflik lainnya di seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki proses negosiasi yang tepat dan memiliki struktur kerja yang jelas, dengan dukungan akademik dan masyarakat sipil sepenuhnya. Akan tetapi, proses yang dilakukan oleh pemerintah belum memiliki implimentasi yang tepat. Jenderal Ekachai menjelaskan bahwa proses perdamaian dunia memiliki tiga bagian:

Pertama, struktur kelompok kerja harus lengkap. Termasuk Badan Intelijen Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kekeadilan dan lainnya, bukan memiliki jumlah pekerja hanya beberapa orang. Kedua, struktur pekerjaan harus tersedia secara luas di semua tingkatan yaitu harus mendengarkan pendapat orang-orang pada saat yang sama, karena tidak ada masalah di dunia ini yang berbicara dengan 4-5 orang bahkan selesai. Ketiga, Harus ada proses kerja yang baik dengan rencana yang jelas, dimulai dengan membangun kepercayaan terlebih dahulu. Bukannya tahap pertama bernegosiasi pemerintah langsung memberi panduan masyarakat untuk menurangi kekerasan, tanpa saling memahami [CITATION Off17 \l 1033].

Adapun dari pandangan konstruktivisme yang perlu dibentuk oleh pemerintah karena Dalam konflik, terdapat hubungan erat antara agen dan strukturnya. Struktur ini bukan sesuatu yang sudah ada dari dulu melainkan hasil dari pola yang terbentuk dari praktik sosial yang dilakukan berulang ulang oleh aktor/

agen-agen tersebut. Konsepsi negara atau pemerintah mengenai siapa mereka itu dan apa keinginan yang mereka inginkan berkaitan dengan identitas yang diperoleh dari struktur yang dimaknai bersama secara intersubjektif, dan bukannya melalui pembentukan interaksi sosial sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bagaimana kepentingan suatu negara menjadi acuan utama sehingga negara sedemikian rupa bekerjasama dengan rakyat maupun struktur-struktur dalam masyarakat untuk pencapaian hal ini. Perilaku sosial seperti yang terjadi dalam konflik digerakan oleh norma yang memiliki ikatan kuat dengan negara tersebut sehingga norma ini memiliki peranan yang penting dalam menjadi panduan bagi negara dalam menentukan sikap sikap maupun strategi strategi yang akan diambil.

(3.2) *social purposes* adalah keinginan bersama untuk mencapai kepada target yang diinginkan bersama seperti kesamaan, kebebasan, perdamaian, sejahtera, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik.

Pada zaman globalisasi negara menghadapi tantangan berbagai masalah selain masalah tradisional juga masalah non-tradisional seperti masalah narkoba, ketidakstabilan ekonomi global, masalah cyber dan climate change. Semua masalah yang telah disebutkan, bukan hanya pemerintah yang akan mendapat dampak tetapi semua masyarakat Thailand, baik Wilayah Selatan atau Utara pasti akan mengalaminya.

Keinginan masyarakat tidak terlepas dari perdamaian dan kesejahteraan. Namun, telah peneliti menunjukkan tabel jumlah kekerasan di tiga provinsi Selatan

memiliki jumlah yang tinggi, termasuk perekonomian dan tingkat pekerjaan biasa maupun birokrat yang masih rendah karena kurang pendidikan. Hal terbesar merupakan masalah yang ingin dikembangkan oleh pemerintah selain mengurangi kekerasan. Berdasarkan *Southern Border Development Plan: National Economic and Social Development Plan (2017 - 2021)* sebagai berikut :

- 3.2.1. *Security*, stabilitas negara, masyarakat sejahtera,
- 3.2.2 *Social Cohesion and Just Society*, Ciptakan keadilan Mengurangi ketimpangan di setiap dimensi,
- 3.2.3. *Competitiveness*, meningkatkan tingkat kompetisi yang berkualitas,
- 3.2.4. *Enhancement Human Capital Development and Strengthening*, memberkembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas pada berbagai dimensi,
- 3.2.5. *Good Governance*, pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,
- 3.2.6. *Sustainable Development and Growth*, berkembang, stabil, berkelanjutan di bidang ekonomi, politik dan kualitas hidup [CITATION Sou17 \l 1033].

Berdasarkan strategi nasional dapat dipahami bahwa tujuan dan keinginan pemerintah tidak berbeda dengan masyarakat yang ingin negara menjadi lebih berkualitas. Masalah yang dialami oleh masyarakat tiga provinsi selatan bukan sekedar kekerasan sehari-hari lagi, masalah narkoba dan kemiskinan merupakan masalah terbesar bagi masyarakat tiga provinsi Selatan. Faktor yang menyebabkan narkoba tidak lepas dari kekurangan pendidikan yang telah peneliti memberi tabel

pada bab dua bahwa pendidikan di tiga provinsi Selatan masih ditingkat yang rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tingkat pendidikan yang rendah karena masyarakat memiliki hambatan kemiskinan yang tidak mampu untuk mengantar anak-anaknya untuk sekolah. Berdasarkan hasil penilaian negara tahun 2017, wilayah tiga provinsi selatan memiliki kelemahan dan kekuatan sebagai berikut :

Weakness

3.2.1.1. Perekonomi memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah, karena ketergantungan pada sektor pertanian yang memiliki masalah efisiensi dan manajemen produksi. Sebagian besar petani adalah petani kecil dan masih memproduksi hasilnya secara tradisional. Teknologi dan inovasi dalam pengolahan digunakan untuk meningkatkan nilai produk pertanian masih rendah, termasuk kurangnya pengetahuan dalam manajemen produk yang sistematis.

Saran peneliti adalah pemerintah harus mengembangkan sektor industri dan inovasi di wilayah tiga provinsi Selatan seperti yang dikembangkan di wilayah lainnya. Karena selama ini di wilayah Timur dan utara telah memiliki inovasi yang cukup tinggi dibidang pertanian, karena pemerintah mengatarkan para ahli ke wilayah mereka. Sebaliknya di wilayah tiga provinsi Selatan pemerintah belum mengirimkan para ahli untuk memperkembangkan industri pertanian.

3.2.1.2. Kekurangan tenaga kerja di sektor manufaktur, kurangnya tenaga kerja disektor pertanian industri dan layanan, tenaga kerja terampil tidak sesuai dengan permintaan pasar.

Disini kembalikan kepada sistem pendidikan, terlihat jelas bahwa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kepada potensi yang rendah. Mengikuti strategi nasional *Enhancement Human Capital Development and Strengthening* yang merupakan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Disini pemerintah perlu mengembangkan sektor pendidikan atau berkembang pendidikan kejuruan kepada warga lokal untuk mendapatkan peluang kemampuan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan permintaan pasar.

Strengths

3.2.1.2.1. Kondisi topografis dan iklim, yang cocok untuk produksi tanaman tropis. Terutama karet, kelapa sawit, dan merupakan daerah perikanan penting bagi negara.

3.2.1.2.2. Proporsi anak-anak dan remaja sangat tinggi. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk pekerja terampil dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung pembangunan ekonomi di daerah.

3.2.1.2.3. Wilayahnya memiliki tempat kosong yang cukup banyak dan luas untuk mengembangkan agroindustri, seperti pengolahan karet, karet, kelapa sawit dan industri perikanan untuk ekspor. Terutama di distrik Nong Chik dan provinsi Pattani. Serta menjadi lokasi zona pengembangan ekonomi khusus di Narathiwat yang dapat menarik investasi untuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

3.2.1.2.4. Sumber daya alam dan ekosistemnya beragam di daratan (Hutan Hala-Bala) dan laut (Pantai Talo Capo, Pantai Kaek, Provinsi Pattani dan Pantai Naratat provinsi Narathiwat). Termasuk tradisi budaya uniq dan beragam merupakan identitas

daerah. Hal ini mampu berkembang menjadi pariwisata ekowisata, sejarah dan budaya.

3.2.1.2.5. Jaringan transportasi dapat terhubung baik di dalam maupun luar negeri. Seperti pos pemeriksaan perbatasan, pelabuhan laut, kereta api dan bandara, serta kota perbatasan potensial (Betong Su-ngai Kolok) dapat menghubungkan pembangunan ekonomi dengan wilayah selatan, tengah, dan timur. Termasuk negara tetangga (Negara Bagian Kelantan dan Negara Bagian Perak, Malaysia)

Opportunity

3.2.1.3.1. Pengembangan kerjasama internasional seperti kerangka pengembangan zona ekonomi trilateral, Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT), Program Pengembangan Bersama Thailand-Malaysia (JDA), Proyek Strategi Pengembangan Bersama untuk Wilayah Perbatasan Thailand-Malaysia (JDS), menciptakan peluang bagi Memperluas kerjasama dalam pembangunan ekonomi Infrastruktur untuk perdagangan dan investasi bersama

3.2.1.3.2. Liberalisasi Perdagangan dan Komunitas Ekonomi ASEAN setelah 2015, merupakan peluang bagi sektor manufaktur untuk memperluas pasar barang dan jasa di daerah tersebut Termasuk peluang untuk pengembangan transportasi dan logistik untuk terhubung di dalam kawasan untuk mendukung transportasi barang dan pariwisata negara-negara dengan kecenderungan semakin meningkat.

3.2.1.3.3. Kemajuan dalam sains, teknologi, inovasi, akan merupakan peran penting dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan daya saing pada berbagai

sektor. Baik pertanian, industri dan jasa, serta mempengaruhi kualitas hidup dari pengembangan fasilitas untuk membuat hidup orang lebih sejahtera.

3.2.1.3.4. Kebijakan pemerintah secara serius dan terus menerus berfokus pada resolusi kerusuhan di tiga provinsi selatan. Merupakan faktor penting yang akan mengarah pada perdamaian di daerah dan peluang untuk pembangunan ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menciptakan pendapatan bagi masyarakat. Termasuk pembangunan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berlejudan [CITATION Sou17 \l 1033].

Beberapa hal yang telah disebutkan merupakan keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap wilayahnya yaitu perkembangan lebih lanjut terhadap sektor industri, inovasi agar menambahkan peluang kerja dan mengurangi kemiskinan yang sekarang di alami oleh masyarakat. Jika pemerintah dapat menerapkan strateginya yang direncanakan, kemajuan di wilayah tiga provinsi selatan tidak jauh lagi menemui kesejahteraan.

(3.3) relational comparisons with other social categories sebagai komparasi atau perbandingan secara relevan dalam menemukan penyelesaian dari kategori lain yang berupa perbandingan konflik yang dialami oleh sesuatu kelompok dengan kelompok lainnya untuk menghindari perlawanan secara fisik.

Dalam penyelesaian konflik setiap negara perlu belajar dari pengalaman sejarahnya atau pengalaman dari negara lain yang relevan dengan kasus yang dialami oleh negaranya. Konflik itu tidak muncul hanya di Thailand Selatan saja,

tetapi negara lain juga mengalami konflik. konflik tersebut ada beberapa negara berhasil dalam menyelesaikan dan masih ada beberapa negara gagal dalam menyelesaikan konflik. Pelajaran dari berbagai negara tersebut, akan merupakan model untuk pemerintah Thailand dalam menemukan kasus yang relevan dengan konfliknya, terutama tentang konflik identitas.

Di Thailand memiliki mayoritas populasinya berasal dari suku/ras yang sama, dan hanya 5% yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jumlah tersebut merupakan angka yang kecil dibandingkan negara lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, yang memiliki proporsi yang lebih tinggi. Termasuk Cina yang memiliki ras minoritas yang lebih dari setengah dari negaranya, Amerika memiliki populasi seluruh dunia. Maka pemerintah Thailand dapat belajar penyelesaian konflik identitas dari model-model tersebut.

Pemerintah Thailand perlu memahami lebih dalam tentang masalah kelompok minoritas dan perlu mempelajari tentang penyelesaian konflik keragaman. Seperti kasus dari Kuming, capital Yunan di Cina. Kunming terkenal sebagai tujuan wisata populer, Yunan adalah wilayah besar dengan populasi 40 juta orang, memiliki suku Hun (suku penduduk asli Yunan), dan adanya suatu kelompok minoritas lainnya seperti ThaiTibet dan suku pegunungan lainnya. Permerintah Cina telah berhasil dalam menemukan cara pengelolaan untuk semua kelompok minoritas dapat hidup berdampingan *co-exist* tanpa kekerasan. Di kampus *University of Nationality* di Kuming ini mahasiswa dari berbagai suku/ras mempelajari bersama, namun pelajaran mereka tentang keragaman suku/ras tanpa diskriminasi dalam posisi dan

promosi. Pengalaman dari Cina tidak hanya kasus dari kumming termasuk wilayah lainnya dapat dikatakan tertarik bagi pemerintah Thailand dalam mempelajarinya.

Kasus kedua adalah Malaysia, populasinya terdiri dari tiga suku/ras utama: Cina, Melayu dan Tamil. Pada awalnya tiga suku/ras tersebut tidak terintegrasi dengan baik, mereka telah berkonflik sejak awal kemerdekaan dan terjadinya kerusuhan. Namun, demikian, pemerintah berusaha untuk membuat *different group co-exist*. Meskipun suku Cina telah didiskriminasi, tetapi Malaysia tidak mengalami pemberontak seperti masa yang lalu lagi. Dan perlu dicatat bahwa ada sejumlah besar masyarakat Buddha-Thai yang masih tinggal di Malaysia Utara, mereka masih beragama Buddha, masih mempelajari bahasa Thai dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka seperti orang Buddha biasa tanpa adanya masalah berbeda dengan situasi di Thailand Selatan. Ketiga, Singapura adalah salah satu negara yang berhasil dalam integrasi minoritas yang memiliki tiga ras yaitu: Cina, Melayu, Tamil. Singapura menunjukkan keberhasilannya dengan tanpa adanya pemberontak di negaranya [CITATION Run07 \l 1033].

Pengalaman internasional akan merupakan bahan penambah pemahaman pemerintah Thailand termasuk masyarakat Thailand wilayah lainnya dalam memahami konflik di Thailand Selatan untuk menemukan cara yang lebih tepat dalam mengatasi konflik.

(3.4) *cognitive models* yaitu suatu kerangka kognitif yang perlu dibangun oleh pemerintah, supaya membangun kesadaran masyarakat atau untuk membentuk

kerangka pemikiran agar menghindari kesalahpahaman, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat.

Pada hasil wawancara keinginan mayoritas masyarakat adalah pengakuan, perdamaian, dan kesamaan. Disini perlu diusahakan oleh pemerintah bahwa keinginan masyarakat sebenarnya bukan sekedar megurangi kekerasan sehari-hari saja, tetapi masyarakat juga ingin pengakuan dari pemerintah. Pada kasus sebelumnya yaitu setelah gelombang kekerasan pada tahun 2004, muncul banyaknya penelitian-penelitian yang menelitikan tentang situasi tersebut. Penelitian tentang politik dan sejarah Patani sebelum tahun 2004, tidak dapat diakui oleh pemerintah karena dikatakan oleh pemerintah penelitian-penelitian tersebut sebagai ancaman keamanan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang membahas tentang “kebenaran” dan “kekuasaan” sangat dilarang oleh pemerintah.

Setelah insiden tahun 2004, munculnya suatu penelitian yang berjudul “Sejarah Patani” yang dituliskan oleh Ibrahim Sukree (2006), penelitian lokal ini merupakan salah satu penelitian penting dalam memahami sejarah Patani, pembahasan didalamnya merupakan hal yang tidak pernah dipelajari oleh orang Melayu sendiri. Penelitian ini dapat pengakuan dari masyarakat Melayu lebih dari pada pengakuan sejarah Thailand, kerana penelitian ini sebagai gambaran suku bangsa mereka. Tentu saja penelitian ini tidak diakui oleh pemerintah karena dari awal pemerintah tidak ingin mengakui bangsa Melayu. Beberapa buku dan penelitian yang membahas tentang sejarah Patani harus dilakukan dengan sembunyi karena

sering kali pemerintah menyatakan kepada peneliti atau penulis tentang sejarah Patani sebagai kelompok separatisme.

Berbeda dengan penelitian yang ditulis tentang Patani oleh orang non-Melayu, yang ditulis oleh Thanet Arponsuwan (2006), berjudul *Origins of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand*, yang menulis tentang sejarah Patani dan separatisme. Penelitian ini dapat pengakuan dari pemerintah lebih dari pada penelitian masyarakat lokal. Perhatian pemerintah kepada masyarakat Melayu sangat berkurang bagi masyarakat Melayu, membuat masyarakat Melayu memiliki traumatis dengan pemerintah [CITATION Eka16 \l 1033].

Khongchai Hattha (2009), penulis buku tentang Patani secara komprehensif termasuk sejarah, ekonomi, politik dan suku bangsa. Penulisan Hattha tidak berbeda jauh dengan penulis lokal yang menuliskan tentang sejarah Patani. Hattha mengumpulkan informasi dari masyarakat lokal dan merumuskan menjadi saran dalam menyelesaikan masalah sebagai berikut :

3.4.1. Memberi perhatian terhadap sejarah lokal, terutama tentang sejarah Patani yang selama ini merupakan hal yang disembunyikan oleh pemerintah. Seperti beberapa penelitian dan buku-buku yang menulis tentang Patani oleh para ahli lokal, merupakan buku yang dilarang oleh pemerintah membuat masyarakat tidak dapat peluang untuk memahami dan mempelajari tentang sejarah Patani. oleh karena itu, organisasi sejarah lokal dan semua sektor terkait harus membentuk pengetahuan tentang Patani agar semua masyarakat seluruh Thailand mengetahui dan memahami.

3.4.2 Mempercepat dalam menciptakan kurikulum lokal, untuk menjadi alat pelajaran bagi guru lokal. Selama ini belum ada kurikulum terkait sejarah Patani yang diakui oleh semua pihak.

3.4.3. Restorasi Situs arkeologi di wilayah Selatan seperti dengan merawat pemulihan kota-kota kuno lainnya di Thailand seperti Sukhothai dan Adudhaya. Sebaliknya di wilayah Selatan jarang adanya proyek-proyek dalam hal pembangunan, penggalian, pencarian pengetahuan, kebenaran, sejarah dan arkeologi. Menurut Hattha, ia menyarankan pemerintah harus mengadakan lebih banyak restorasi di wilayah Selatan.

3.4.4. Membentuk museum kota, museumnya harus memuat informasi sejarah mereka dan mengadakan pameran tentang sejarah di museum tersebut. Selama ini, mereka sebagai masyarakat Melayu masih belum memiliki tempat untuk mempelajari sejarah mereka sendiri [CITATION Hat09 \l 1033].

Mempertimbangkan empat saran dari Hattha, peneliti melihat bahwa penting bagi pemerintah membentuk sebuah kognitif yang saling mengakui oleh semua pihak, agar mencapai kepada perasan we-ness dan we- feeling bersama.

3.4.5. Media, media-media merupakan alat yang penting bagi negara dalam menyebarkan sesuatu. Selama ini media-media belum merubahkan kata-kata “Penjahat Selatan” dan “Ekstrimis Selatan” kata “Selatan” di belakang kata penjahat tersebut dipahami oleh masyarakat di wilayah lainnya bahwa mayoritas dari masyarakat Selatan memiliki pikiran yang ekstrimis, sebaliknya bukan semua

masyarakat di wilayah Selatan memiliki pikiran yang ekstrimis tersebut. Pengaruh dari media tersebut mengakibatkan kesalahpahaman masyarakat wilayah lain terhadap masyarakat Selatan tersebut berubah menjadi diskriminasi.

Pada tahap ini, pemerintah perlu mengubah sistem media atau mengubah *discourse* yang di presentasikan oleh media sebelumnya agar masyarakat seluruh Thailand memiliki pemahaman yang sama untuk menghindari kesalahpahaman yang akan menunjukan kepada perasaan diskriminasi.

Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori-teori konflik universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma nasional atau lokal agar objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan bangsa kita. Faktor-faktor sebagai pendukung analisis pemecahan konflik tersebut antara lain: aktornya, isu, faktor penyebab, lingkupnya, usaha lain yang pernah ada, jenis konflik, arah/potensi, sifat kekerasan, wilayah, fase dan intensitas, kapasitas dan sumbernya, alatnya, keadaan hubungan yang bertikai, dan sebagainya.

Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada zaman dahulu Thailand Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki kerajaan tersendiri, hingga kerajaan tersebut dijajah oleh kerajaan Siam atau Thailand. Setelah adanya perjanjian Anglo-Siam bagian dari wilayah Patani menjadi pemiliknya kerajaan Thailand. Masuknya tahun 1938 dibawah kepemimpinan Jenderal P.Phibulsongkhram yang menngadakan kebijakan asimilasi budaya Thai ke seluruh wilayah di Thailand. Kebijakan tersebut masyarakat minoritas pada bagian Thailand Selatan mengalami kesulitan dalam menjalani agama dan budaya mereka, tekanan dan penindasan tersebut mendorong masyarakat Melayu Patani berusaha untuk melepaskan diri dari Thailand.

Akhirnya muncul gerakan untuk mempertahankan hak, budaya dan agama diawalkan oleh Haji Sulong yang mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah Thailand. Akan tetapi, permintaan tersebut gagal, akhirnya Haji Sulong ditangkap dengan tunduhan sebagai penghasutan dan dihilangkan tanpa jejak. Oleh karena itu, kebijakan integrasi pemerintah Thailand mendapat tantangan keras dari masyarakat dan menimbulkan perlawanan separatisme.

Setelah kematian Haji Sulong, munculnya berbagai gerakan separatisme diawalkan oleh Gabungan Melayu Patani Raya (GEMPAR) dengan tujuan menyatukan kaum Melayu untuk menuntut kemerdekaan dari pemerintah Thailand dan muncul *National Liberation Front* (NLF), bertujuan untuk menuntut otonomi dan mendirikan negara Islam. Tidak sekedar itu gerakan separatisme semakin

berkembang dan memiliki banyak kelompok seperti BRN, PULO, Bersatu. Akan tetapi gerakan pada masa ini tidak terlalu mendapatkan dukungan oleh masyarakat.

Masuknya tahun 2000an aksi kekerasan mengalami peningkatan hingga terjadinya tiga insiden besar pada tahun 2004 yang menewaskan masrakat dijumlah yang sangat tinggi. Setelah insiden tersebut pemerintah tidak lagi memiliki sengketa dengan kelompok separatisme, tetapi masyarakat yang mengalami insiden yang dilakukan oleh pemerintah membuat konflik di Thailand Selatan semakin kental dan sulit diatasinya. Setelah insiden besar pemerintah mengeluarkan dua kebijakan yang semakin menambah permasalahan seperti menurunkan tentara dan membentuk hukum khusus yang melanggar hak asasi manusia masyarakat.

Tabel: Perbandingan jumlah peristiwa kekerasan, jumlah kematian dan jumlah peluka tahun 2004-2016



Sumber: [CITATION Dee17 \l 1033]

Namun, ada beberapa negara yang mengikuti konflik di Thailand Selatan sekaligus menyarankan arah penyelesaian kepada pemerintah seperti OKI dan Malaysia. Meskipun telah ada bantuan dari beberapa pihak internasional konflik di Thailand Selatan masih belum selesai hingga sekarang.

Terdapat empat atribut penyelesaian dari konsep *collective identity* yaitu *constitutive norms* adalah langkah yang penting bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah seperti saling memahami dan menghormati, *social purposes* adalah menemukan titik keinginan yang sama oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kepada tujuannya, *relational comparisons with other social categories*, adalah tugas dari pemerintah dalam menemukan cara penyelesaian konflik yang relevan dengan mengikuti atau mempelajari kasus negara lain sebagai model, *cognitive model* adalah tugas pemerintah dalam membentuk kerangka pemikiran masyarakat termasuk masyarakat wilayah Selatan dan masyarakat wilayah lain untuk membangun pemahaman yang sama dan sekaligus mengeluarkan kebijakan yang menunjuk kepada kesamaan. Dan pentingnya bagi pemerintah dalam memahami konflik dengan memandang situasi konflik hingga mengeluarkan penyelesaian yang sesuai dengan kondisi konflik, termasuk cara yang diterima oleh semua pihak tak terkecuali.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu, (1) pemerintah Thailand (2) masyarakat dan pemuda Thailand (3) penelitian selanjutnya.

1. Peneliti berharap kepada pemerintahan Thailand untuk segera menyelesaikan Konflik di Thailand Selatan secara efektif, dengan cara penyelesaian yang mengikuti syarat hak asasi manusia, menghindari kekerasan dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Rakyat.

2. Peneliti berharap kepada masyarakat Patani, terutama pemuda atau mahasiswa dalam melanjutkan karya-karya yang berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan yang lebih bagus dan menyampaikan akar-akar permasalahan untuk menemukan cara penyelesaian yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Rekomendasi penelitian selanjutnya, didasarkan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini meliputi, (1) pemilihan nara sumber, (2) keterbatasan wawancara dalam mendalami konflik, (3) metode penelitian, sehingga direkomendasikan pada penelitian selanjutnya:

a. Pada penelitian ini pemilihan nara sumber hanya di tingkat mikro, sehingga pada penelitian selanjutnya direkomendasikan (1) memperluas nara sumber lebih banyak. (2) menemukan nara sumber yang memberitahukan tentang konflik lebih dalam. (3) penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka peneliti direkomendasikan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih variasi.

REFERENSI

- Acharya, A. (2000). *The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia*.
- Acharya, A. (2003). *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*. In A. Acharya. New York: Council University Press.
- BBC, N. (2017). 13 ปีเหตุการณ์ดาบใบ. *BBC Thai News*.
- Boards, N. E. (2016). *จีดีพีต่อหัวและข้อมูลประชากรของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย*. Retrieved from Thaiwebsite: <http://www.thaiwebsites.com/provinces-GDP.asp>
- Chalk, P. (2008). *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand*. *National Defense Reserch Institute (NDRI)*, -.
- Christie, C. (1996). *A Modern History of Southeast Asia : Decolonization, Nationalism and Separatism*. Singapor: ISEAS.
- Chularat Damrongwittham, D. N. (2017). *ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้*. *Peace Survey*, 8-21.
- Council, O. o. (2017). *แผนพัฒนาภูมิภาค (Regional development plan)*. Retrieved from https://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7524&filename=index
- Deepsouth. (2011). *การสัมภาษณ์พิเศษ: อดีตผู้นำแบ่งแยกดินแดนและนักยุทธศาสตร์กองทัพบกไทย*. *Learn and understand the southern border*, 2-15.
- Deepsouth. (2017, 07 21). *Deepsouthwatch*. Retrieved from ศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้: <https://deepsouthwatch.org/th/node/11053>
- Emauel, A. (2016). *Communitarian International Relations*. London: The base economy .
- Fathy, A. (1994). *Sejarah Patani*. Pustaka Darussalam.

- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak. The British Council, Jakarta.*
- Fitra, A. L. (2016). Upaya Pemerintah Thailand dalam Penyelesaian Konflik di Thailand Selatan tahun 2004-2009. *E-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6.
- Forbes, E. (2004). The Muslim of Thailand. In E. Forbes, *Historical and Cultural studies* (pp. 111-122). Centre for South East Asian Studies.
- Hanhabun, D. (2010). กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาปอเนาะ. In *ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้*. Bangkok: Ramkhamhaeng.
- Hattha, K. (2009). เศรษฐศาสตร์ การเมืองและประวัติศาสตร์ชายแดนภาคใต้. 133-134.
- Imtiyaz, Y. (2009). *Ethnoreligious and Political Dimensions of the Southern Thailand Conflicts*. Washington DC: Stimson.
- IslamTV. (2016, Oktober 26). *รำลึกถึงเหตุการณ์ตากใบ. Via Islam TV.*
- Isranews Agency. (2011, May 1). วันที่ 28 เมษายน กับปัญหาการใต้สวนการเสียชีวิต เหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ. *Isranews Agency*, pp. 1-3.
- Kaedang, R. (2007). *War and Peace: Southern Border*. Bangkok: Kaenchand Printing Center.
- Khaosod. (2019, 08 27). *ข้อหมกมุ่น: จากหมดสติไปสู่ความตาย เกิดอะไรขึ้นกับ Abdullah E-Musor. Thai BBC*, pp. 3-15.
- Limthong, J. (2016). 12 ปี เหตุการณ์กรือเซะ. *Pracha Thai*, 1-3.
- McCargo, D. (2008). Tearing Apart the Land: Islam ad Legitimacy i Southern Thailand. In D. McCargo. Coenell University Press.
- Mccargo, D. (2009). MAPPING NATIONAL ANXIETIES: THAILAND'S SOUTHERN CONFLICT. 54-60.
- MFA. (2009). *International Cooperation*. Bangkok: MFA of Kingdom Of Thailand.

Najamuddin Khairur Rijal. (2016). TINJAUAN KONSTRUKTIVISME POLITIK-
HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERTIMBANGAN INDONESIA
PADA PEMBENTUKAN ASEAN POLITICAL- SECURITY
COMMUNITY. *JURNAL OPINIO JURIS*, 31-33.

NESDB. (2017). แผนพัฒนาภาคใต้: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12. *Southern Development Plan*, 13-16.

NSO. (2002). *สถิติแห่งชาติ*. Retrieved from
<http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%8A/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.aspx>

NSO. (2015). *สถิติแห่งชาติ*. Retrieved from
<http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%8A/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.aspx>

OKI. (2006). *Regional Council of Government*. Retrieved from
<https://www.oki.org/category/2006-press-releases/>

Panich, K. W. (2011). *อัตลักษณ์ของสหภาพยุโรปและการต่อสู้เพื่ออาณาจักร*.
European Studies.

Pheungnet, P. (2014, 04 11). *ความรุนแรงระลอกใหม่ (The New Round of Violence)*.
Isranews, pp. 2-4.

- Pisan. (2009, November 24). *Isranews Agency*. Retrieved from Isra News:
<https://www.isranews.org/south-news/scoop/item/1601-2009-11-24-07-33-52.html>
- Prasartkul, P. (2010). *คุณภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย* ปี 2552. In P. Prasartkul, *The Quality of People in Southern Border Provinces of Thailand 2009*. Bangkok: Thailand Research Fund : Mahidol University.
- Preecha, P. L. (2004). *การสร้างเอกลักษณ์และมรดก*. Bangkok: Sirindhr Anthropology Centre.
- Primus, J. (2012, 01 30). Kekerasan di Thailand Selatan Belum Usai. *Internasional Kompas*, pp. -.
- Pundit. (2012, 05). *ASIAN CORRESPONDENT*. Retrieved from Asia's Leading independent News: <https://asiancorrespondent.com/2012/04/56-deaths-and-547-injuries-in-thailands-deep-south-in-march-what-is-next-part-1/>
- Pundit. (2015). *ASIAN CORRESPONDET*. *Asia's leading independent news*.
- Reptawon. (2012, 02 16). Sejarah Konflik Berdarah di Thailand Selatan. *Republik Tawon*, pp. -.
- Rosyidin, M. (2014). Arm Race and Collective Identity Building in Southeast Asia. *ASEAN Security Community*, 2,5,7.
- Srisompob Jitpromsri, P. S. (2006). การคลายความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย. In *The Proverty of Structural Explanations* (pp. 102,106). Bangkok.
- Thai PBS News. (2016, February 14). ย้อนรอยเหตุการณ์ปล้นปืนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. *Thai PBS*, pp. 1-2.
- Tuansiri, E. (2016). *ทศวรรษของการเมืองชายแดนใต้*. Pattani: Prince of Songkhla University.

(2005). Justice process implementation in 3 southern border provinces: problems and solutions. In J. Ua-amanuai, *Justice process implementation in 3 southern border provinces* (pp. 44-45). Bangkok: Secretariat of the Cabinet.

Wendt. (1992). Introduction to International Relations. 307-308.

Wyatt, D. K. (1967). A Thai Version of Newbold's: Hikayat Patani. *Juornal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*.

Yuniarto, P. (2005). Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5,6,92,98.



LAMPIRAN

Pertanyaan representasi dari pemerintah

Nara Sumber 1 :

Status : Kepala desa dari provinsi Pattani

Interview dilakukan pada : Tanggal 17 Oktober 2019

1. Bagaimana situasi kekerasan di Thailand Selatan sekarang?

Jawab : rata-rata masih ada saja kekerasannya, kadang kejam kadang tidak. Meskipun begitu kondisi di wilayah selatan tetap tidak aman.

2. Sebagai kepala desa (birokrat pemerintah) apakah memiliki peran dalam menyelesaikan konflik?

Jawab : saya sebagai kepala desa, sering mengikuti rapat-rapat tetapi yang memiliki peran dalam menyelesaikan konflik lebih kepada pejabat posisi teratas seperti gubernur. Saya sebagai kepala desa lokal dan memahami konflik kebanyakan tidak dapat peran apa-apa dalam menyelesaikan konflik, meskipun ada rapat-rapat mendengar masalah dari saya, saya belum melihat pemerintah menerapkan saran dari saya. Gubernur sendiri bukan orang lokal yang memahami situasi yang sebenarnya. Masalah sebenarnya terkait dengan historis yang ingin diakui oleh pemerintah dan gubernur yang merupakan orang luar tidak memahaminya. Dan cara yang diterapkan oleh gubernur sebagai pemerintah terdekat lebih menerapkan upaya pemerintah pusat. Dan salah satu masalah dari pemerintah sendiri adalah jika adanya pergantian pemimpin kebijakan selanjutnya juga berganti, membuat kebijakan tidak berkelanjutan.

3. Apakah menurut bapak kepala desa pemerintah sudah menyelesaikan dengan cara yang sudah sesuai?

Jawab: menurut saya belum, karena seperti kita tahu, konfliknya sudah lama tetapi belum dapat mengatasinya, semakin lama semakin susah dibatasinya dan semakin lama semakin menambah kompleksitasnya. Menurut saya pemerintah masih kurang serius dalam menemui cara yang lebih cocok. Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi konflik seperti menurunkan tentara, hukum kusus, dan membayar kepada keluarga korban konflik. jujur saja dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada wilayah tiga propinsi selatan sangat banyak, tetapi dana-dana tersebut malah tidak menyampaikan ke masyarakat, karena dana-dana tersebut untuk gaji tentara yang sangat banyak menetap di wilayah selatan.

4. Pemerintah telah memberikan benefit yang sudah cukup banyak?

Jawab : tidak dapat diingkari bahwa pemerintah juga telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat wilayah selatan, contohnya memberikan dana negara untuk masyarakat menunaikan haji. Jika orang luar negeri melihatkan kebijakan ini, semua akan mengatakan bahwa pemerintah Thailand sangat baik kepada masyarakat dan pemerintah sangat serius dalam menyelesaikan konflik. sebaliknya, kebijakan ini hanya merupakan penyelesaian puncak bukan dari akar masalah yang sebenarnya. Maka hingga sekarang konfli tetap berada.

5. Pandangan tentang hukum kusus? Apakah hukum tersebut perlu diterapkan?

Jawab : mayoritas masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak ingin adanya hukum kusus, dan tidak perlu diterapkan. Sebaliknya pihakpejabat pemerintah mengatakan hukum kusus itu perlu diterapkan. Menurut saya adanya hukum ini bukan cara yang menuju ke perdamaian dan adanya hukum ini menurut saya tidak adil bagi masyarakat wilayah selatan.

6. Apakah adanya kelompok pemberontak akan dapat memisahkan diri?

Jawab : tidak mungkinkan wilayah selatan dapat memisahkan diri, mungkin mereka (para pemberontak) akan memikirkan mereka bisa. Tetapi kemungkinannya tidak bisa karena pemerintah sangat bertentangan dengan memisahkan diri. Harus memahami

bahwa sebenarnya, alasan menjadi kelompok separatis bukan hanya untuk memisahkan diri saja tetapi untuk mengeklaim keadilan, lihat saja pada zaman dulu orang melayu tidak ada yang menjadi birokrat, hingga adanya kelompok separatisme mengeklaim hak mereka, pemerintah baru mengadakan kebijakan untuk masyarakat melayu yang sebelumnya tidak ada.

Nara Sumber 2 : Nama : Waipoch Srinuan

Posisi : Direktur Kantor Kebijakan dan Perencanaan Pertahanan

Interview dilakukan pada : Bulan April 2008

Interview dilakukan oleh : *Deep South Watch Organization*

Sumber: <https://deepsouthwatch.org/th/node/5468?fbclid=IwAR2-voFtpS57zByogDa4bvp8eH0dXYibECC-mSZQMCfJHiYcKioXOm2nPA>

1. Apakah kelemahan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di wilayah selatan?

Jawab : Saya tidak terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah selatan, bukan ISOC (Komando Operasi Keamanan Internal) atau NSC (Dewan Keamanan Nasional). Yang saya akan menceritakan merupakan pemikiran dan praktik-praktik yang telah dilakukan oleh pemerintah, saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan sudah berjalan dan sudah ada kemajuan, tetapi belum dapat menyesuaikan kebijakannya dengan masalah yang terjadi, maka menurut saya kebijakannya belum berhasil, dapat dipanggil sebagai belum mengadakan penyelesaian yang benar. Saya ingin mengatakan strategi dari pemerintah adalah *lost strategy* karena ancaman zaman sekarang memiliki dua ancaman adalah *Traditional Threat* dan *Non-Traditional*



Threat. Namun, pemerintah masih menerapkan upaya dari faktor lama *traditional threat*, hal ini membuat upayanya tidak berhasil. Pengalaman di wilayah selatan menunjukkan bahwa strateginya lebih merumuskan tentang ancaman *Non-Tradisional*. Faktor-faktor baru yang penting dipertimbangkan untuk merumuskan strategi tidak dilakuakn oleh pemerintah, maka strateginya tidak akan cukup dalam, tidak berfungsi dan tidak akan memiliki efek praktis. Namun, cara berpikir militer atau lembaga keamanan yang telah mempelajari strategi ini selama 20-30 tahun, itu berfokus pada ancaman tradisional, sehingga susah diberubahkannya. Menurut saya dengan pelajaran sebelumnya saya akan mengatakan bahwa strategi untuk wilayah selatan tidak bisa menggunakan satu strategi saja atau “*one size fit all*”, bukan anda memiliki satu strategi dan menyeluruhkan strategi tersebut antara masyarakat dan pembeontak, karena mereka berdua berbeda.

2. Apakah pemerintah sudah serius dengan menyelesaikan konflik?

Jawab : menurut saya pemerintah belum serius dalam menyelesaikan masalah, selain melihat masalah yang tidak mutakhir dengan situasi, kemudian mengarah pada perumusan strategi yang salah. Dapat dilihat dari awal kehadiran situasi. Unit di Bangkok bertugas dalam merumus strategi dan dikirim ke Unit Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) 4, lalu ISOC, untuk mengubah strategi menjadi praktik. Namun masalah yang terjadi di wilayah selatan saat ini menyebabkan tidak lagi bisa berpikir dalam kerangka lama. Dan kemudian di selatan masih memiliki itu kondisi yang berbeda di setiap desa. Karena itu tidak dapat menggunakan *one size fit all* untuk semua seperti sebelumnya. pemerintah harus memahami kondisi area juga memahami kondisi sosial di wilayah selatan, ketika merencanakan strategi, seseorang harus memahami strategi dan taktik tersebut. Jika tidak hasil konkrit tidak akan muncul. Menurut saya masalah besar yang dialami oleh pemerintah bukan perang separatis tetapi perang perasaan. Pemerintah perlu memenangkan perasaan masyarakat wilayah selatan.

3. Apakah masih berharap dengan perdamaian di wilayah selatan?

Jawab : saya masih berharap kerana masalah yang terjadi bukan masalah besar yang ditak ada jalan untuk mereda, sebenarnya ada. Kita bisa mengatasinya kalau kita memahami masyarakat.

Nara Sumber 3 :

Status : Pejabat pemerintah dari Provinsi Pattani

Posisi : Anggota Organisasi Administrasi Kecamatan

Interview dilakukan pada : Tanggal 22 Oktober 2019

1. Bagaimana situasi kekerasan di Thailand Selatan sekarang?

Jawab : Masih merupakan wilayah merah. Kekerasannya masih merata dan masih susah diatasinya.

2. Apakah menurut pemerintah sudah menyelesaikan dengan cara yang sudah sesuai?

Jawab : Belum, karena kekerasan yang masih berlanjut sampai sekarang merupakan akibat kebijakan yang gagal oleh pemerintah. Seperti beberapa pejabat yang menangkap warga mengakibat balas dendam kepihak pemerintah dan pemerintah ikut balas dendam balik kepada masyarakat. Maka masalahnya masih berputar ditempat yang sama, tidak ada kemajuannya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa semua kebijakan pemerintah itu gagal dan sia-sia. Ada beberapa keijakan pemerintah yang membrikan manfaat kepada masyarakat seperti adanya kegiatan-kegiatan sosial dan lainnya dan ini bukan cara penyelesaian masalah tetapimerupakan layanan biasa oleh pemerintah. Yang lebih sya ingin melihatkannya adalah keadilan dan kesamaan yang selama ini pemerintah kurang memberikan.

4. Apakah kelemahan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di wilayah selatan

Jawab : Yang saya melihat pemerintah usaha untuk menutupi masalah konflik yang sebenarnya. Seperti kata-kata yang digunakan “Kekerasan” bukan “Konflik”. Selain itu, keterbatasan Bahasa adalah batasan yang menciptakan kesenjangan antara

pemerintah dan orang Muslim daripada orang Budha. Sementara kesenjangan antara umat Buddha dan Muslim secara keseluruhan telah meningkat sejak 2004, karena Muslim percaya bahwa militer yang melakukan kekerasan dan umat Buddha percaya bahwa pelaku kekerasan adalah Muslim. Selain itu, umat Buddha di mulaimemisah diri dengan Muslim. Atu masalah lagi adalah jika terlibat dalam kegiatan dengan Muslim atau menuntut pemerintah untuk menyembuhkan mereka yang terkena dampak, mereka akan dituduh sebagai organisasi manfaat publik (LSM) pendukung pihak pemberontak. Menyebabkan beberapa kelompok orang memilih untuk tidak berpartisipasi dipihak manapun. Pemerintah gagal dalam membentuk kepercayaan terhadapnya.



Pertanyaan kepada masyarakat

Nara Sumber 1 :

Status : Mahasiswa dari provinsi Narathiwat

Jenis kelamin : Perempuan

Interview dilakukan pada : Tanggal 17 Oktober 2019

1. Menurut kamu apakah pemerintah telah menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai/cocok?

Jawab : menurut saya belum, karena jika pemerintah sudah menggunakan cara yang benar konflik akan berhenti. Samapai saat ini saya masih melihat kekerasan di wilayah saya.

2. Menurut kamu apakah pemerintah sudah serius dalam menyelesaikan masalah?

Jawab : menurut saya belum, pemerintah belum begitu serius dalam menyalaesai masalah,

3. Menurut kamu apakah pemerintah sudah memberikan kesamaan wilayah Selatan seperti yang diberikan wilayah lain?

Jawab : menurut saya belum, karena saya masih merasa tentang kesamaan contohnya dan pada sektor ekonomi, mayoritas masyarakat selatan masih dikeadaan miskin, termasuk sektor pendidikan yang standarnya masih rendah. Menurut saya pemerintah harus menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih fleksible.

4. Apakah hukum kusus yang diterapkan di wilayah selatan dapat menyelesaikan konflik?

Jawab : sebenarnya saya juga baru tahu tentang hukum kasus dan orang-orang sekitar saya juga banyak yang kurang tahu tentang hukum kasus ini. Dan saya tidak tahu apakah pemerintah sudah deklarasi kepada masyarakat sebelumnya karena saya

belum dapat informasinya. Dan menurut saya hukum ini membuat saya merasa takut dan merasa tidak aman, meskipun saya bukan kelompok pemberontak, karena tahu bahwa hukum kasus ini memberi hak wewenang kepada pejabat pemerintah dalam menangkap masyarakat.

5. Apakah merasa diskriminasi terhadap pemerintah?

Jawab : iya, karena ketika saya pergi jalan-jalan ke Bangkok, mereka melihat saya seperti saya sebagai orang separatis. Karena di media sendiri menyimpul situasi di wilayah selatan dengan mengatakan bahwa pemberontak “selatan” kata-kata selatan tersebut menurut saya media sengaja menyeluruh orang selatan sebagai kelompok separatis. Seharusnya hanya menyebut kelompok pemberontak pemerintah bukan pemberontak “selatan”.

6. Apakah masih ada harapan konflik akan berhenti?

Jawab : masih, sepertinya pemerintah perlu menemukan cara lain, karena upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang belum begitu berhasil menurut saya.

7. Sebagai masyarakat wilayah selatan apakah ingin mengadakan tentara atau tidak? Dan bagai mana perasaan dengan adanya banyak tentara?

Jawab : tidak, karena adanya tentara membuat saya merasa terancam.

8. Apa yang ingin melihat di wilayah selatan?

Jawab: perekonomian yang stabil, orang punya kerja, dan kesamaan wilayah selatan dengan wilayah lain.

9. Apakah ingin Bahasa melayu menjadi bahsa resmi? Juga identitas?

Jawab : iya mau, karena selama ini Bahasa melayu belum diberikan perhatian oleh pemerintah.

10. Apakah ingin pemerintah memberikan otonomi kusus ke wilayah selatan atau lebih ingin bergabung dengan Thailand?

Jawab : tidak mau otonomi, saya lebih ingin dengan Thailand, tetapi juga ingin diakui oleh pemerintah Thailand lebih banyak dengan identitas melayu.

Nara Sumber 2 :

Status : Mahasiswa dari Provinsi Pattani

Jenis kelamin : Perempuan

Interview dilakukan pada : Tanggal 18 Oktober 2019

1. Menurut kamu apakah pemerintah telah menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai/cocok?

Jawab : belum, karena saya masih merasakan konflik.

2. Menurut kamu apakah pemerintah sudah serius dalam menyelesaikan masalah?

Jawab : belum, saya melihat bahwa beberapa masalah pemerintah tidak menyelesaikan dengan cara yang lebih serius, contoh jika ada korban dari kekerasan pemerintah hanya memberi uang kepada keluarga korban, dan cara ini bukan cara yang dapat menghilangkan perasaan marah, dan cara ini tidak dapat mengurangi konflik, seharusnya pemerintah harus menemukan cara lain untuk mengatasi konflik agar tidak akan korban lagi.

3. Menurut kamu apakah pemerintah sudah memberikan kesamaan wilayah selatan seperti yang diberikan wilayah lain?

Jawab : jika mau berbicara tentang kesamaan, kesamaan yang sudah puas oleh saya adalah kesamaan dalam memeluk agama. Namun, jika dipertanyakan tentang kesamaan dengan wilayah lain, saya mau jawab belum di bidang kebebasan, karena saya merasa tidak bebas dalam kehidupan sehari-hari dengan banyak tentara dan hukum kusus.

4. Apakah hukum kusus yang diterapkan di wilayah selatan dapat menyelesaikan konflik?

Jawab : tidak, selama pejabat pemerintah masih menangkap masyarakat dengan tanpa bukti, hukum ini tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Sebaliknya menambah perasaan terancam kepada masyarakat dari pada perasaan aman.

5. Apakah merasa diskriminasi terhadap pemerintah?

Jawab : beberapa hal saja, saya sudah puas dengan peluang sekolah dan kebebasan memeluk agama. Kecuali masalah keamanan.

6. Apakah masih ada harapan konflik akan berhenti?

Jawab : saya masih berharap.

7. Sebagai masyarakat wilayah selatan apakah ingin mengadakan tentara atau tidak? Dan bagai mana perasaan dengan adanya banyak tentara?

Jawab : tidak, menurut saya keadaan tentara membuat saya merasa takut.

8. Apa yang ingin melihat di wilayah selatan?

Jawab : saya ingin melihat jalan tanpa tentara, tidak ada senjata, karena setiap saya keluar dari rumah pasti melihat tentara membawa senjata dan saya tidak menyukainya. Harapan saya suatu hari para tentara ini dapat dikurangi.

9. Apakah ingin Bahasa melayu menjadi bahasa resmi? Juga identitas?

Jawab : saya ingin, identitas juga karena saya grow up dibawah identitas melayu dan ingin membahasnya lebih banyak dengan identitas asli saya, karena elama ini saya hanya mempelajari identitas Buddha dalam buku pelajar.

10. Apakah ingin pemerintah memberikan otonomi kusus ke wilayah selatan atau lebih ingin bergabung dengan Thailand?

Jawab : tidak mau, karena saya takut akan muncul masalah antar orang melayu sendiri.

Nara Sumber 3 :

Status : Sudah kerja dari Provinsi Pattani

Jenis kelamin : Lelaki

Interview dilakukan pada : Tanggal 18 Oktober 2019

1. Menurut kamu apakah pemerintah telah menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai/cocok?

Jawab : menurut saya belum, jika caranya talah benar seharusnya konflik sudah mereda tetapi hingga sekarang konfliknya masih ada.

2. Menurut kamu apakah pemerintah sudah serius dalam menyelesaikan masalah?

Jawab : menurut saya pemerintah hanya menyelesaikan konflik di puncannya bukan diakarnya, jadinya konflik susah diselesaikan.

3. Menurut kamu apakah pemerintah sudah memberikan kesamaan wilayah selatan seperti yang diberikan wilayah lain?

Jawab : belum, contoh karena jika ada demonstransi besar-besaran di Bangkok media-media dan pemerintah tidak menyebutkan itu merupakan pemberontak, tetapi ketika di Thailand selatan sebenarnya beberapa saja yang melakukan situasi tetapi media-media dan pemerintah menyatakan kita sebagai pemberontak. Saya merasa tidaj adil dengan kata-kata seperti itu.

4. Apakah hukum kusus yang diterapkan di wilayah selatan dapat menyelesaikan konflik?

Jawab : tidak, karena tidak sedikit pejabat pemerintah memanfaatkan haknya dalam melanggar hak asasi manusia masyarakat dan sering menindaskan masyarakat. Adanya hukum ini membuat masyarakat merasa diskriminasi.

5. Apakah merasa diskriminasi terhadap pemerintah?

Jawab : menurut saya di bidang hukum yang merasa diskriminasi oleh pemerintah, pada bidang lain seperti pendidikan dan ekonomi kita sudah memiliki kebebasan meskipun belum begitu sejahtera.

6. Apakah masih ada harapan konflik akan berhenti?

Jawab : saya masih harapan dengan wilayah yang damai, hal ini perlu dapat keseriusan dalam menyelesaikan konflik di wilayah selatan.

7. Sebagai masyarakat wilayah selatan apakah ingin mengadakan tentara atau tidak? Dan bagai mana perasaan dengan adanya banyak tentara?

Jawab : tidak, dan saya merasa bahwa mayoritas masyarakat juga tidak ingin adanya tentara. Saya merasa tidak aman dibawah keadaan tentara, saya merasa lebih aman pada zaman sebelum adanya tentara seperti tahun 2003 kebawah.

8. Apa yang ingin melihat di wilayah selatan?

Jawab : perdamaian

9. Apakah ingin Bahasa melayu menjadi bahsa resmi? Juga identitas?

Jawab : saya sebagai orang sudah tua lebih ingin melihat orang Thailand saling memahami dan megakui orang melayu sebagai orang Thailand tanpa merasan diskriminasi. Untuk Bahasa melayu tidak diresmikan juga tidak masalah, asalkan saling memahami.

10. Apakah ingin pemerintah memberikan otonomi kusus ke wilayah selatan atau lebih ingin bergabung dengan Thailand?

Jawab : menurut saya pemerintah sendiri tidak ingin memberikan otonomi di wilayah selatan, dan otonomi menurut saya bukan cara yang dapat menyelesaikan konflik, karena bukan semua masyarakat menginginkan otonomi. Lebih baik pemerintah menelesaikan dengan cara lain.

Nara Sumber 4 :

Status : Mahasiswa dari Provinsi Yala

Jenis kelamin : Lelaki

Interview dilakukan pada : Tanggal 20 Oktober 2019

1. Apakah pemerintah telah menyelesaikan masalah dengan cara yang sudah sesuai/cocok?

Jawab : Menurut saya belum semua, beberapa masalah sementara telah diselesaikan, tetapi masalah masih bisa terlihat belum mereda. Menurut saya pemerintah belum memberi perhatian secara menyeluruh.

2. Apakah pemerintah serius dalam menyelesaikan masalah?

Jawab : Menurut saya belum, karena selama ini saya hanya melihat pemerintah menyelesaikan masalah sementara. Contoh jika ada pemboman atau penembakan, pemerintah hanya usaha mencari pelaku tanpa mencari alasan mengapa kejadian itu bisa berlaku. Akhirnya yang terjadi adalah masalah yang sama dan menyelesaikan dengan cara yang sama tidak fleksible.

3. Apakah pemerintah telah memberikan kesamaan kepada tiga provinsi selatan seperti yang diberikan kepada provinsi lain?

Jawab : Pada poin ini saya akan membagi menjadi tiga tahap. Pertama, sektor pendidikan, saya pernah melihat hasil penilaian tentang pendidikan di tiga provinsi selatan ternyata paling rendah dan saya kecewa terhadap hasil tersebut. Dan saya melihat mengapa hasil bisa seperti itu, karena pertama kekurangan personil guru yang berkualitas, fasilitas masih kurang, dan lingkungan yang tidak mendukung. Kedua, adalah sektor ekonomi yang zaman dulu pada wilayah tiga provinsi selatan merupakan provinsi yang agak maju, seperti di provinsi saya Yala, ada kereta dan menjadi pusat komersial yang maju, dan saya masih ingant masyarakat di provinsi saya sangat mewah dalam kehidupannya karena perekonomian mendukung. Setelah berlaku situasi kekerasan mengakibatkan perekonomian berhenti, para investor tidak ingin

menginvestasikan dengan kita, maka perekonomian menjadi lemah dan akhirnya mengakibatkan pada semua pihak masyarakat hingga menjadi kemiskinan. ketiga adalah layanan pemerintah, seperti infrastruktur di tiga provinsi selatan masih kurang berkualitas, karena adanya konflik membuat para doctor, professor tidak ingin menetap di tempat kita.

4. Apakah hukum kusus yang diterapkan di wilayah selatan dapat menyelesaikan konflik?

Jawab : Tidak, menurut saya hukum inilah yang semakin menambahkan masalah. Misalnya, jika pemerintah menangkap warga ke kamp militer dan menyiksa warga tersebut tanpa bukti kesalahan, membuat keluarga warga tersebut menambah perasaan ingin balas dendam terhadap pemerintah karena perlakuan berlebihan oleh pemerintah. Maka masalahnya masih di lingkaran ini dan tidak dapat berubah, karena tidak sedikit saya melihat warga-warga merasa dendam terhadap pemerintah, jika tidak bubar hukum ini masalah tidak akan selesai, karena hukum ini bukan alternatif yang baik menurut saya, seharusnya pemerintah harus mencari cara yang lebih adil.

5. Apakah masih ada harapan konflik akan berhenti?

Jawab : Iya masih, masalahnya masih bisa dihetika dega keseriusa pemerintah dalam meyelesaika konflik dengan cara yang lebih fleksible.

6. Apakah merasa diskriminasi terhadap pemerintah?

Jawab : Iya, yang saya sangat merasa diskriminasi keitika saya keluar dari tiga provin selatan, orang akan melihat saya seperti saya sebagi separatis. Salah satunya adalah berita dari sosial media yang sering menyebutkan tiga provinsi selatan dengan secara menyelurgh bahwa sebagai separatis, membuat saya tidak menyeangkan dengan cara presentasi media itu, dan seharusnya pemerintah mengatasi media tersebut.

7. Sebagai masyarakat wilayah selatan apakah ingin mengadakan tentara atau tidak? Dan bagai mana perasaan dengan adanya banyak tentara?

Jawab : Bisa mengadakannya tetapi sekucupnya saja, selama ini saya melihat lebih banyak tentara dari pada warga. Saya tidak mengatakan bahwa tentara itu tidak baik, ia juga ada kebaikannya seperti menangkap narkoba dan sebagainya dan jika membatalkan hukum kusus tentara juga tidak memiliki hak untuk melaksanakan wewenang secara berlebihan seperti sebelumnya. Maka saran saya bisa ada tetapi dikurangi jumlahnya. Karena banyak tentara tidak membuat saya merasa aman. Dan dana dari pemerintah yang sangat banyak untuk membayar kepada tentara tidak sampai ke warga, maka jika mengurangi tentara dapat mengambil dana itu itu untuk membagi ke sektor infrastruktur.

8. Apakah yang ingin melihat di tiga provinsi selatan?

Jawab : Perdamaian seperti dulu, contohnya pada zaman dulu sebelum kekerasan terjadi kita orang Melayu dan orang Siam (Thailand) dapat bersahabat dengan baik.

9. Apakah ingin pengakuan terhadap Bahasa dan identitas Melayu?

Jawab : Iya, saya sebagai mahasiswa kuliah di Jawa, saya melihat pemerintah memberi perhatian atau pelestarian terhadap bahasa jawa dan budaya jawa, sebaliknya bahasa dan identitas Melayu tidak dapatkannya. Contohnya, masa saya belajar Tadika (sekolah agama anak SD) saya pernah mempelajari dengan Bahasa Melayu tetapi sekarang sudah diubah menjadi Bahasa Thai semua. Hal ini terlihat jelas bahwa pemerintah tidak ingin mengakuinya membuat para-para guru-guru tidak menyukainya. Dan satu contoh lain, kemarin pada hari raya besar muslim para pemuda dari tiga provinsi selatan sepakat memakai baju Melayu untuk kampanye identitas mereka, tetapi malah dipandang oleh pemerintah para pemuda itu sebagai separatis. Menurut saya itu merupakan pemikiran yang tidak adil karena tujuannya bukan untuk separatis.

10. Apakah ingin pemerintah memberikan otonomi kusus ke wilayah selatan atau lebih ingin bergabung dengan Thailand?

Jawab : saya tidak ada ide tentang ini, karena saya belum melihat potensi warga di tempat saya dalam memimpin, ada atau tidak asalkan konfliknya dapat diselesaikan.

Nara Sumber 5 :

Status : Mahasiswa dari Provinsi Pattani

Jenis kelamin : Perempuan

Interview dilakukan pada : Tanggal 28 Oktober 2019

1. Apakah pemerintah telah menyelesaikan masalah dengan cara yang sudah sesuai/cocok?

Jawab : Belum, karena jika cara penyelesaiannya sudah cocok pasti konfliknya akan mereda, tetapi sekarang saya masih melihat kekerasannya.

2. Apakah pemerintah serius dalam menyelesaikan masalah?

Jawab : Menurut saya biasa saja, karena saya masih melihat berbagai di tempat saya selain kekerasan saya masih melihat masalah narkoba dan masalah kemiskinan.

3. Apakah pemerintah telah memberikan kesamaan kepada tiga provinsi selatan seperti yang diberikan kepada provinsi lain?

Jawab : Beberapa bidang sudah seperti kebijakan layanan masyarakat 30 Bath untuk semua penyakit dan kebijakan gratis belajar 15 tahun. Tetapi saya masih merasa diskriminasi terhadap keadilan di tempat saya tentang hukum kesus. Saya merasa tidak adil dengan adanya hukum tersebut.

4. Apakah hukum kesus yang diterapkan di wilayah selatan dapat menyelesaikan konflik?

Jawab : Tidak, saya akan menyatakan hukum ini semakin menambahkan konflik, karena hukumnya tidak ada keadilan dari awal dan saya tidak setuju adanya hukum ini.

5. Apakah masih ada harapan konflik akan berhenti?

Jawab : Harapannya ada tetapi yang saya merasa susah akan menyelesaikan konflik dan kekerasan, karena selama ini tidak ada kemajuan apa-apa yang dapat dirasakan konflik akan selesai.

6. Apakah merasa diskriminasi terhadap pemerintah?

Jawab : Yang saya merasa diskriminasi beberapa hal saja, seperti adanya hukum khusus tersebut dan saya ingin pemerintah lebih memperhatikan dengan kita sebagai suku minoritas agar menjadi suku yang diakui oleh pemerintah dan orang Thailand Utara.

7. Sebagai masyarakat wilayah selatan apakah ingin mengadakan tentara atau tidak? Dan bagaimana perasaan dengan adanya banyak tentara?

Jawab: Tidak, saya merasa takut dengan banyaknya tentara ditempat saya, contohnya sering kali ada pembaca atau peboman di kamp tentara yang menetap di pinggir jalan. Setiap kali saya melewati kamp tentara saya merasa takut.

8. Apakah yang ingin melihat di tiga provinsi selatan?

Jawab : Perdamaian dan kesejahteraan

9. Apakah ingin pengakuan terhadap Bahasa dan identitas Melayu?

Jawab : Iya, saya ingin bahasa dan identitas kita lebih memberikan perhatian bagi pemerintah agar kita tidak terlalu merasa didiskriminasi.

10. Apakah ingin pemerintah memberikan otonomi khusus ke wilayah selatan atau lebih ingin bergabung dengan Thailand?

Jawab : Saya tidak ingin, karena jika adanya otonomi saya takutnya kita tidak dapat perintah diri sendiri karena kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya bantuan dari negara lain.

Nara Sumber 5 :

Status : Mahasiswa dari Provinsi Pattani

Jenis kelamin : Perempuan

Interview dilakukan pada : Tanggal 28 Oktober 2019

1. Apakah pemerintah telah menyelesaikan masalah dengan cara yang sudah sesuai/cocok?

Jawab : Menurut saya tidak, karena kalau sudah sesuai, konfliknya akan mereda. Dan karena pemerintah tidak memahami masyarakat membuat masalahnya berkelanjutan.

2. Apakah pemerintah serius dalam menyelesaikan masalah?

Jawab : Mungkin, karena saya melihat dana yang dibawa ke wilayah tiga provinsi selatan, jumlahnya besar. Tetapi caranya masih tidak benar atau cocok membuat masalahnya masih ada

3. Apakah pemerintah telah memberikan kesamaan kepada tiga provinsi selatan seperti yang diberikan kepada provinsi lain?

Jawab : Yang merasakan jika keluar dari wilayah selatan, mindset masyarakat ditempat lain agak melihat kita seperti ekstrimis, salah satunya adalah media yang membuat mindset masyarakat ditempat lain memandang masyarakat wilayah tiga provinsi selatan seperti itu. Menurut saya lebih merasakan itu.

4. Apakah hukum kusus yang diterapkan di wilayah selatan dapat menyelesaikan konflik?

Jawab : Tidak, ini lebih menambahkan kebencian antara masyarakat dan pejabat pemerintah. Semakin ada hukumnya semakin ada pejabat yang menangkap masyarakat dan belum tentu masyarakat yang ditangkap tersebut benar-benar salah. Dan hal ini menurut saya malah menambahkan masalah. Misalnya mau ada hukum ini, harus lebih adil, karena saya melihat berita beberapa kasus termasuk menalggar hak asasi manusia dan saya tidak setuju dengannya. Dan kalo ada hukum seperti ini pada seluruh Thailand mungkin saya bisa setuju, tetapi karena hukum kasus ini hanya ada di tempat saya dan saya merasa tidak adil.

5. Apakah masih ada harapan konflik akan berhenti?

Jawab : Iya, jika pemerintah memahami kita. Seperti yang dilakukan oleh partai politik (Partai ANAKHOTMAI), mereka mendatangi dan menanyakan tentang masalah yang dialami dan apa yang menjadi keinginan masyarakat termasuk jika mereka bertanya tentang mencabut tentara, mayoritas masyarakat setuju dan senang mendengarkan kata-kata tersebut. Kebijakan pemerintah sekarang seperti memandang kita sebagai ekstrimis jika pemerintah tidak menghapuskan pikiran ini, kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat tidak akan muncul, karena pemerintah tidak percaya sama kita.

6. Apakah merasa diskriminasi terhadap pemerintah?

Jawab : Mungkin mayoritas merasakan itu, karena keluarga saya tidak pernah menjadi korban dan saya tidak bisa membayangkan itu. Jika berbicara tentang hukum kusus iya saya merasa tidak adil.

7. Sebagai masyarakat wilayah selatan apakah ingin mengadakan tentara atau tidak? Dan bagai mana perasaan dengan adanya banyak tentara?

Jawab: Iya mau, saya tidak suka ketika saya keluar dan melihat jumlah tentara yang banyak di pinggir jalan. Dan adanya tentara 70% saya merasa tidak aman, karena jmlaj tentara sebanyak itu tidak bisa mengatasi konflik apalagi.

8. Apakah yang ingin melihat di tiga provinsi selatan?

Jawab : Mencabut tentara, saya ingin melihat pemeintah yang lebih memahami masyarakat. Ingin melihat pemerintah yang adil karena sekarang banyak pejabat pemerintah yang menangkap masyarakat tanpa bukti kesalahan. Dan tentaranya tidak begitu bermanfaat, karena menghabiskan dana tetapi masalah masih ada. Pemerintah harus mengurangi egonya, seperti membuktikan bahwa proses keadilan negara masih ada dan berguna. Karena saya belum melihatkan itu, pemerintah harus membentuk kepercayaan kepada pemerintah.

9. Apakah ingin pengakuan terhadap Bahasa dan identitas Melayu?

Jawab : Saya berharap Bahasa melayunya dipelestariannya. Tidak harus meresmikan bahasanya, tetapi jangan dihapusannya.

10. Apakah ingin pemerintah memberikan otonomi kusus ke wilayah selatan atau lebih ingin bergabung dengan Thailand?

Jawab : Saya ingin bergabung dengan Thailand, saya tidak berharap tentang memisahkan diri atau ada otonomi kusus. Tetapi pemerintah harus lebih memahami kita dan menemukan cara yang cocok dalam menyelesaikan konflik di tempat kita.

Nara Sumber 6 : Mantan Presiden kelompok separatisme

Interview dilakukan pada : Bulan April 2008

Interview dilakukan oleh : *Deep South Watch Organization*

Sumber: <https://deepsouthwatch.org/th/node/5468?fbclid=IwAR2-voFtpS57zByogDa4bvp8eH0dXYibECC-mSZQMCFJHiYcKioXOm2nPA>

1. Apakah merupakan alasan yang menimbulkan *New round violence* ?

Jawab : Menurut saya kekerasan gelombang baru mendapat akibat dari kesalahan menggunakan kebijakan oleh pemerintah. Saya akan mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan kebijakan penindasan bukan cara yang menuju ke perdamaian.

2. Apakah Otonomi kusus akan menyelesaikan konflik?

Jawab : Tidak, hak otonomi tersebut akan menjadi langkah pertama dalam memisahkan diri oleh kelompok separatism baru. Saya akan memberi pemahaman saya dengan dua dimensi. Pertama, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis baru atau *New round violence* untuk memisahkan diri, bahkan izin untuk otonomi akan mengaahkan ke pembentukan negeri dan hal tersebut sangat tidak disetujui oleh pemerintah. Kedua, otonomi daerah bukan kebijakan yang diinginkan

oleh mayoritas masyarakat lokal, karena otonomi daerah akan menimbulkan konflik antara mereka sendiri dan masyarakat tidak inginkannya. Saran saya pemerintah harus melakukan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Kebijakan yang sangat perlu adalah pemerintah harus memberikan persamaan wilayah Selatan sama persis dengan wilayah lain. Selama ini jika ditanyakan kepada masyarakat, mereka akan jawab belum merasa puas terhadap kebijakan pemerintah sebaliknya pemerintah mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan dan melakukan penyelesaian dengan serius dan macam-macam cara.

3. Siapa yang merupakan “Pelaku” kekerasan sekarang?

Jawab : Saya benar-benar tidak yakin siapa yang merupakan pelaku kekerasan pada periode baru ini. Saya pernah ada rapat dengan mantan kelompok separatis *old group* semua juga masih curiga siap yang menjadi pelaku kekerasan sekarang dan kami juga pernah bertemu dengan kelompok separatis baru tetapi tidak berbau keinginan untuk kejasama dengan kami.

4. Zaman sekarang apakah masih ada kemungkinan untuk memisahkan diri?

Jawab : Kalau membicarakan tentang memisahkan diri zaman sekarang, Patani harus memiliki faktor pendukung yang kuat sebagai negara super power seperti Timur Tengan dan Amerika. Bicarakan tentang Timur Tengah saya sebagai mantan ketua kelompok separatis tidak pernah dapat bantuan untuk memisahkan diri dari mereka apalagi Amerika yang melihat benefit sumber daya alam terlebih dahulu dan Patani tidak memiliki sumber daya sebanyak itu. Tidak mungkin Patani bisa memisahkan diri dengan kondisi seperti itu.